

Birokrat & Politisi Teladan Biografi

H. Abdul Wahab Dalimunthe, S.H.

Birokrat & Politisi Teladan Biografi

H. Abdul Wahab Dalimunthe, S.H.

Dr. Anang Anas Azhar, M.A.

Drs. Rivai Nasution, M.M.

Dr. Iwan, M.H.I.



Dinas Perpustakaan dan Arsip
Provinsi Sumatera Utara

Medan: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, 2023
xxxvi, 188 hlm., 24 cm.
ISBN: 978-623-7549-11-6

Hak Cipta © 2023, Pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, tanpa izin sah dari penulis dan penerit.

2023.

Dr. Anang Anas Azhar, M.A.

Drs. Rivai Nasution, M.M.

Dr. Iwan, M.H.I.

Birokrat & Politisi Teladan

Biografi H. Abdul Wahab Dalimunthe, S.H.

Cetakan ke-1, September 2023

Editor : Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si.
Kholisul Fatikhin

Desain Grafis : Tuah Utusan Hasibuan

Tata Letak : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Dicetak oleh Bumi Andalas

Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara

**Jalan Brigjen Katamso No. 45 K Sei Mati,
Medan Maimun, Kota Medan 20159**



Testimoni

Istri H. Abdul Wahab Dalminuthe, S.H.



D U M M Y
Pertama-tama, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang tetap memberikan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW. Melalui hidayah dan rezeki yang diberikan, kita tetap sehat selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ketika tim penulis buku ini datang menghadap anak saya dengan menelpon anak saya, dengan maksud menuliskan biografi suami saya H. Abdul Wahab Dalimunthe, S.H., jujur saya menyambut baik keinginan ini. Tim penulis, beberapa kali ingin berjumpa, namun karena persoalan kesehatan yang saya hadapi, tim belum berkesempatan mewawancarai saya. Atas nama saya pribadi dan keluarga, saya memohon maaf sedalam-dalamnya.

Pertemuan saya pertama kali dengan Pak Wahab, saat menghadiri undangan pesta perkawinan di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu. Saat itu, saya diundang khusus untuk bernyanyi pada pesta perkawinan anak Bupati Labuhanbatu Iwan Maksum. Saya diundang Group Ahmad Baqi, untuk tampil sekaligus bernyanyi menghibur undangan di sana. Setelah saya bernyanyi, dan bersiap pulang, saya terkejut bapak terus menerus mengikuti saya sampai rombongan kami pulang menuju Stasiun Kereta Api di Rantau Prapat. Saat itu, bapak ditunjuk Bupati Labuhanbatu sebagai Ketua Panitia. Setelah rombongan mau berangkat, dan menaiki Kereta Api, bapak mengejar saya, mencari saya dari gerbong ke gerbong. Akhirnya menemukan saya di sudut gerbong tempat saya duduk. Setelah bertemu, bapak memberi surat kepada saya. Saya membacanya, ternyata isi surat itu "*Ke mana alamat, saya akan datang*". Sejak itulah, saya sebut sebagai pertemuan saya dengan bapak. Ini sangat berkesan kapada bapak, apalagi saat itu saya menyanyikan lagu berjudul "*Selimut Putih*", lagu "*Petani*" dan beberapa lagu lainnya. Saya pun tak sadar, seluruh lagu yang saya nyanyikan direkam bapak. Dan rekamannya diberikan dan diperdengarkan kepada saya kembali, ketika bapak mendatangi orang tua saya di Pematang Siantar.

D U M M Y

Rekaman lagu inilah yang menjadi alasan, mengapa bapak mendatangi rumah dan menemui orang tua saya di Pematang Siantar. Bapak pun langsung mengutarakan niat hatinya yang tulus untuk mempersunting saya sebagai istri. Bapak saya pun tidak keberatan. Tetapi anak saya ini, kata bapak, belum memenuhi syarat untuk menikah, karena melangkah saudara kandung sendiri. Itu pun dapat dilakukan dengan syarat bapak mendatangi abangnya di Yogyakarta. Karena keinginannya yang kuat untuk mempersunting saya sebagai istri yang masih belia tepatnya menginjak Kelas II SMA ini, bapak Wahab langsung menemui abangnya di Yogya. Dan *Alhamdulillah*, niat itu disetujui abangnya, dan selang satu tahun hubungan saya dengan bapak, dengan izin ayah dan ibu, kami pun menikah.



Menjadi Raja Sehari (Pengantin) pada Tahun 1971

D U M M Y
Saat ingin menikahi saya, saya sempat berkata kepada bapak “*Saya ini pak, boru panjaitan. Dan orang ranto kan orang yang taat dan hebat saya bilang*”. Lantas bapak bilang ke saya, “*Tak apa-apa, ini sudah pilihan saya,*” kata bapak saat itu.

Sebelum menikahi saya, ayah saya juga menyampaikan kepada bapak, bahwa anaknya ini adalah anak yang kelima. Setelah menikah, saya tinggal bersama suami saya selama satu minggu di Pematang Siantar bersama orang tua. Setelah satu minggu, saya dibawa bapak ke Rantau Prapat untuk tinggal di sana. Apalagi bapak, memang sudah kerja di Rantau Prapat. Tak lama berselang, bapak pun dilantik menjadi Sekda Labuhanbatu.

Saya banyak belajar dari bapak, sebagai ibu Dharma Wanita di Labuhanbatu. Pak Wahab itu, tak segan-segan membimbing saya dengan sekuat tenaga dan tak pernah berhenti. Kemudian, bapak mendidik saya di mana pun dia berada. Tak beberapa berselang, saya memiliki anak di Rantau Prapat, anak saya dua laki-laki dan dua orang perempuan hingga memiliki cucu sebanyak tujuh orang.

Saat bapak menjabat dua periode sebagai Sekwildasu dan dilanjutkan lagi sebagai pejabat inspektorat di Pemprop Sumut saya semakin banyak harus belajar. Ia juga pernah menjabat lagi di Kabiro, Penjabat (Pj) Bupati Langkat dan Pj Bupati Asahan. Ketika itu, saya terus mengikuti bapak dan didikannya kepada saya sangat banyak, begitu juga kepada anak-anak saya. Bapak ini orangnya sangat beragama. Bahkan, setiap tahun pada bulan Ramadhan datang, kami tarawih dan tadarrus di rumah dengan bapak. Ini harus dipenuhi setiap ramadhan. Mungkin karena demikian, karir bapak melonjak sampaikan menduduki jabatan Sekda Propinsi Sumut bahkan pernah menduduki Wakil Gubernur Sumut di masa Gubernur Raja Inal bapak Wakil Gubernur, Ketua DPRD Sumut, anggota DPR RI dua periode dan sampai akhir hayatnya di MK DPR RI.

Yang menarik dari hidup bapak yang saya tahu, di mana pun bapak berada. Bapak tak pernah melupakan masakan khas kampung halamannya dari Labuhanbatu. Ia senang sekali dengan Ikan Baung yang digulai asam. Ikan Baung yang dibakar, Ikan Baung yang disale, kemudian dibakar. Kemudian sangat menyukai kolak jelok asal kampungnya. Ini semua saya pelajari dari bapak untuk memasaknya. Sebagai istri yang taat kepada suami, saya harus ikuti keinginan bapak. Bapak itu, sangat penyayang kepada keluarganya. Selama berkeluarga, saya tak pernah bertikai dan beda pendapat dengan bapak. Kami tetap menjaga hal yang demikian untuk tidak bertengkar dalam keluarga, apalagi dilihat anak-anak. Bapak juga sering memesankan kepada anak-anak, agar sholat tidak tinggal. Buktinya, saat sholat maghrib anak-anak harus di rumah dan sholat di rumah. Itulah setiap saat pesan bapak kepada kami dan tetap kami jalankan sampai hari ini.



Photo Bersama Keluarga dalam Pelaksanaan Resepsi Pernikahan

Mengakhiri masa hidupnya, ia tetap dekat dengan saya dan anak-anak. Selama tiga hari, bapak dirawat di RS Colombia Medan. Hanya tiga hari dan ia merasakan sakit perut saja. Kemudian bapak

D U M M P
meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Namun, pesan yang kami ingat dari bapak adalah “ingat kampung kamu ya”. Di Rantau Prapat, “Itu adalah kampung ku dan kampung kalian juga”. Jadi, jangan lupa sama kampung. Aku dilahirkan di kampungku oleh ibu dan ayahku. Itu yang sering dia ucapkan kepada saya dan anak-anaknya.

Untuk mengingatkan kampung halaman itu, kalau ada yang pesta di Labuhanbatu, saya berusaha tetap datang mengingat kampung halaman bapak disana. Apabila sanak saudara yang pesta di Rantau prapat, saya tetap datang dan harus datang. Bapak sering bilang “*Innamal mukminuu ikhwaa*”. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaaudara. Jadi, kalau ada yang pesta saya tetap datang ke kampung halaman. Saya berharap, kebaikan, kemurahan bapak dalam hidup ini bisa menjadi teladan dan menjadi contoh kepada anak-anaknya.

Bukti ingat kampung halaman juga, bapak sudah puluhan tahun membantu orang-orang kampungnya di Desa Tebing Lingahara, Labuhanbatu. Masjid Al Munawwarah itu yang ada di kampung dia yang membantu hampir sepenuhnya. Bapak selama hidupnya sering berkorban di kampungnya, karena orang tuanya dikuburkan di sana.

Semoga dengan kebaikan dan nasehat bapak yang sudah diberikan kepada kami, tetap kami ingat dan kami jalankan. Kepada tim penulis, saya juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya telah bersusah payah mengumpulkan data dan bahan menuliskan biografi sesungguhnya dari suami saya Abdul Wahab Dalimunthe. Semoga berkah dan bermanfaat kepada bangsa, negara, dan agama.

Medan, 23 Juli 2023

Hj. Atikah Rahman Panjaitan



Pengantar Penulis



D U M M Y

Sudah lama sejak kepergian untuk selamanya Abah Wahab, nama asli dari H. Abdul Wahab Dalimunthe, S.H., agar biografi tokoh asal Labuhanbatu ini segera dibukukan. Sumbang saran dari tokoh-tokoh pemekaran Labuhanbatu, organisasi Iklab Raya dan para pejabat Pemprov Sumut juga menginginkan hal yang sama agar sosok Abdul Wahab Dalimunthe dapat diketahui publik secara luas.

Niat dan realisasi penulisan buku berjudul *Birokrat & Politisi Teladan: Biografi H. Abdul Wahab Dalimunthe SH*” barulah berjalan setelah tim penulis yang diketuai Anang Anas Azhar, Rivai Nasution, dan Iwan Nasution masing-masing sebagai anggota mendapat amanah dan kepercayaan menggarap buku ini dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penggarapan penulisan buku ini, penulis membagi dalam lima bagian penting sisi lain dari kehidupan Abdul Wahab Dalimunthe. Bagian pertama, tentang jejak langkah di kampung halaman. Yang dibahas pada bab ini, terkait jejak kelahiran dan keturunan, masa sekolah rakyat, pendidikan masa penjajahan, jejak pendidikan sekolah menengah pertama. Bagian kedua, tentang meniti karir pendidikan dan kepribadian. Yang diungkap adalah bagaimana Abdul Wahab Dalimunthe menjalani pendidikan sekolah menengah atas, memiliki kepribadian sosial, logat yang tak pernah lekang, mencurahkan pikiran, membangun persahabatan, pemimpin yang moderat, abah yang tak pernah marah, bekerja di Londut, membangun kampung lewat otonomi daerah, pemimpin yang disiplin, dan silaturahmi yang terawat.

Di bagian ketiga dari buku ini, tentang jejak karir di dunia politik meliputi kiprah politik di Partai Golkar, memimpin DPRD Sumatera Utara, kiprah politik di Partai Demokrat, pimpinan Sementara di DPR RI 2019-2014, memimpin Dewan Kehormatan DPR RI. Bagian keempat soal pemikiran politik kebangsaan meliputi; pemikiran di bidang otonomi daerah, tokoh pemekaran di Labuhanbatu Raya, politik pemerintahan di Sumatera Utara, berkompetisi di Pentas Pilkada.

Bagian kelima dalam buku ini membahas pandangan tokoh terkait kebaikan dan kepribadi Abdul Wahab Dalimunthe. Yang diwujudkan dengan sub bahasan apa kata mereka. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga almarhum H Abdul Wahab Dalimunthe SH yang sudah berjibaku, berupaya dengan maksimal mengumpulkan data dan bahan. Sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai waktu yang disepakati. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Gubernur Sumatera Utara, tim pengumpul bahan Samsul Bahri dan Mas Khairani yang ikut serta membantu penyelesaian buku ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan selamat membaca buku ini. Semoga memberi pencerahan dan pemahaman yang lebih sempurna sisi lain dari kehidupan almarhum H Abdul Wahab Dalimunthe. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang dijalankan selama ini memberi manfaat di atas dunia dan dapat diikuti masyarakat Sumatera Utara. Amien ya robbal alamin.

Wassalam
Medan, Agustus 2023

Penulis



Sambutan
Pejabat Gubernur Sumatera Utara



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan karunianya kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan nabi kita Muhammad SAW, yang membawa alam ini dari kegelapan hingga terang menderang seperti saat ini.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Propinsi Sumatera Utara, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang menjadi teladan dalam memimpin Sumatera Utara. Salah satu sosok yang memiliki keteladanan yang baik ini adalah H Abdul Wahab Dalimunthe SH. Sosok ini merupakan bagian yang kita maksudkan. Beliau langsung terlibat membangun SDM di Propinsi Sumatera Utara.

Kepribadian dan kepemimpinan H. Abdul Wahab Dalimunthe SH ketika memimpin di Pemprovsu sangat pantas diteladani. Salah satu keteladanan yang pantas kita ikuti dari jejak rekam beliau adalah gaya memimpin yang tenang, selalu membawa canda tawa, kesejukan dan memberi nasehat kepada bawahan dengan mengedepankan kesantunan. Punya integritas yang tinggi dalam memimpin,

Ucapan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya, saya sampaikan kepada tim penulis yang berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan buku ini. Buku ini sangat pantas untuk dibaca, tidak sekedar kepada ASN semata, politisi, tetapi yang lebih luas kepada masyarakat Sumatera Utara. Buku ini banyak mengangkat sisi lain kepribadian dan keteladanan dari H. Abdul Wahab Dalimunthe SH.

Harapan saya ke depan, akan muncul lagi karya-karya seperti ini. Sehingga dapat menginspirasi ASN di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Geliat penulisan tokoh-tokoh Sumatera Utara seperti ini perlu terus digalakkan dalam rangka menguatkan tradisi intelektual menulis tokoh yang sudah berjasa kepada Sumatera Utara.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabakatu
Medan, 7 Septyember 2023
Pj. Gubernur Sumatera Utara

dto.

Mayjen TNI (Purn) Hassanudin





Sambutan

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Provinsi Sumatera Utara**



D U M P *Alhamdulillah*, puji berangkaikan syukur tak terhingga, kita persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Buku berjudul *Birokrat & Politisi Teladan: Birografi Abdul Wahab Dalimunthe*, yang ada di tangan Anda ini, merupakan potret sosok birokrat dan politisi sukses. Buku yang ditulis dengan bahasa yang lugas, cermat, santun, dan mudah dimengerti semua kalangan ini dalam rangka menghidupkan tradisi keteladanan dari pendahulu kita di Indonesia, terutama di Propinsi Sumatera Utara. Buku ini sangat perlu dibaca, karena banyak memuat kebaikan dan teladan pemimpin kita. Ulasan buku ini seakan mengingatkan kita kembali kepada founding fathers kita yang berpikir penuh untuk membangun bangsa ini lewat jalur birokrat dan politik.

Kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada tim penulis yang sudah menyelesaikan penulisan buku ini sesuai waktu. Kami berharap buku yang berisi banyak informasi dari kehidupan Abdul Wahab Dalimunthe ini memberi manfaat banyak, terutama bagi pemimpin dan generasi kita di masa akan datang.

Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada tim penulis yang bersusah payah mengumpulkan seluruh data yang diperlukan, hingga buku ini diterbitkan lebih sempurna. Kami berharap buku ini menjadi bahan kajian tokoh-tokoh muda Indonesia, terutama mereka yang ingin berkecimpung dalam dunia politik. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua dapat tercapai.

Medan, 11 Agustus 2023
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Provinsi Sumatera Utara

dto.

Dwi Endah Purwanti, S.S., M.Si.

D U M M Y



Sambutan
Presiden RI Ke-6



D U M M P Menggambarkan sosok Abdul Wahab Dalimunthe, sahabat saya, sebagai birokrat dan politisi teladan dalam sebuah biografi saya nilai sungguh tepat. Mengapa? Itu pula yang pertama-tama terlintas dalam pikiran dan memori saya kalau kita bicara tentang Pak Dalimunthe. Tentu saja masih banyak kekuatan dan kelebihan pejuang serta politisi senior ini. Dengan rasa hormat dan segala doa tulus kepada almarhum yang telah berpulang ke Rahmatullah, saya ingin mengedepankan sejumlah testimoni kecil tatkala dulu kami bersama-sama dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

Saya bertemu dan mengenal Pak Wahab Dalimunthe sekitar tahun 2002. Waktu itu, dalam kapasitas saya sebagai Menkopolkam, saya tengah melakukan kunjungan kerja ke Sumatra Utara, dan Pak Dalimunthe sebagai Wakil Gubernur mendampingi saya. Termasuk melakukan kunjungan ke Pematangsiantar dan Samosir. Dalam perjalanan panjang itulah, di dalam mobil, kami berbincang-bincang tentang banyak hal. Tentu, utamanya menyangkut isu-isu politik, sosial dan keamanan yang ada di Sumatra Utara. Sebelum saya kembali ke Jakarta dari 3 hari kunjungan kerja saya ke Sumatra Utara, saya telah memiliki kesan tentang sahabat baru saya itu ~ Pak Wahab Dalimunthe. Saya menilai Pak Dalimunthe adalah seorang yang hemat bicara, tetapi kalau bicara memang itu diperlukan dan ada isinya. Kita masih ingat kata-kata “diam itu emas”, atau “*silence is golden*”. Tetapi, ingat pula “*speech is silver*”. Maknanya, jika kita mesti bicara ya bicaralah. Pasti ada manfaatnya.

Kebersamaan kedua kami adalah ketika Pak Dalimunthe menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, tak selalu mudah seseorang terpilih menjadi anggota DPR. Artinya, hanya mereka yang gigih dan efektif berjuang sehingga akhirnya dipilih oleh rakyatlah yang bisa berkantor di Senayan. Waktu terpilih, Pak Dalimunthe sudah berusia 70 tahun, sementara saya ketika memulai periode kedua sebagai Presiden Indonesia (tahun 2009) usia saya 60 tahun, atau 10 tahun lebih muda dibandingkan Pak Dalimunthe. Kemudian, hingga akhir hayatnya Pak Dalimunthe tercatat mengabdikan di parlemen Indonesia selama 12 tahun. Ini juga waktu yang relatif panjang beliau menjadi wakil rakyat, apalagi pada usia Pak Dalimunthe yang sudah lanjut.

Satu lagi kelebihan dari sahabat saya ini, gigih dalam perjuangan dan ketika berhasil dia curahkan pikiran dan tenaganya untuk menjadi wakil rakyat yang baik.

Dalam rentang waktu 10 tahun lebih bersama-sama di Partai Demokrat, saya menilai Pak Dalimunthe adalah kader senior yang setia dan selalu ingin menjadi bagian dari solusi dan kemajuan partai. Saya amat menghargai ketika Pak Dalimunthe memberikan contoh yang baik kepada kader partai yang lain, dengan sikap, tutur kata dan perilaku yang baik. Karakter seperti inilah yang membuat Pak Dalimunthe dihormati dan disegani oleh kader yang lain.

Saya juga patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Dalimunthe atas sikap dan perilakunya yang penuh keterbukaan dan toleransi dengan siapapun. Baginya, tak ada hambatan untuk berkomunikasi dan bekerjasama baik dengan kawan maupun lawan politik, jika itu berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Karakter seperti ini amat diperlukan sebagai seorang politisi di sebuah negara yang majemuk dan kaya identitas. Sejarah banyak mencatat bahwa sebuah bangsa bisa retak dan pecah lantaran tak bisa mengatasi konflik antar identitas yang sangat tajam. Indonesia memiliki kerawanan bawaan seperti ini. Karenanya, bangsa ini memerlukan pemimpin dan politisi yang pandai menyatukan dan menjaga kerukunan elemen bangsanya yang memang pluralistik.

Inilah testimoni saya tentang Pak Wahab Dalimunthe, atas dasar persahabatan dan kebersamaan kami di berbagi medan penugasan. Semoga almarhum istirahat dengan tenang di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga apa yang telah dilakukan untuk negara di masa lalu dapat diteladani oleh siapapun.

Jakarta, 14 Juli 2023



Jenderal TNI (Purn)
Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
(Presiden Republik Indonesia ke-6)



Sambutan
Dr. Ir. H. Akbar Tandjung



Syukur *alhamdulillah* saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penerbitan buku perjalanan hidup H Abdul Wahab Dalimunthe SH dengan judul *Birokrat & Politisi Teladan Biografi H. Abdul Wahab Dalimunthe, S.H.* Buku ini banyak memotret sisi lain politisi senior berintegritas tinggi. Sejak berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga mengaktifkan diri sebagai politisi Partai Golkar di Provinsi Sumatera Utara 1999-2008.

Tidak dapat dipungkiri, salah satu penyangga demokrasi Indonesia di Era Reformasi adalah munculnya multi-partai. Sejak 1998 hingga saat ini, partai politik menjadi titik sentral politik Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik banyak diisi politisi berintegritas, loyal dan memiliki wawasan luas untuk memikirkan arah bangsa ini sesuai Amanat UUD 1945 agar lebih baik dan berkembang maju.

Secara khusus, saya mengapresiasi penerbitan buku perjalanan hidup H Abdul Wahab Dalimunthe ini sebagai bahan bacaan layak baca sekaligus banyak memuat pesan-pesan yang baik untuk menjadi teladan kepada para politisi manapun di negeri ini. Sosok Abdul Wahab Dalimunthe adalah sosok politisi yang sederhana, pernah mengaktifkan diri di Partai Golkar. Prestasi yang ditorehkan Abdul Wahab Dalimunthe setelah pensiunan dari PNS, ia pernah menjabat Ketua DPRD Sumatera Utara dan Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Utara.

Dalam buku ini, menekankan betapa pentingnya politisi bermoral, beretika dan beradab yang terus menerus menebarkan pesan-pesan *rahman lil'alamin*. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan dalam buku ini terhampar luas, apalagi saat beliau memimpin rapat-rapat resmi di Gedung DPRD Sumut saat menjabat sebagai ketua. Buku ini juga banyak memuat sisi humoris Abdul Wahab Dalimunthe. Sosok yang serius, santai dan banyak canda. Ia juga sosok yang fokus dalam menyelesaikan masalah di meja kerja, sampai-sampai banyak kawan dan lawan politiknya mengakui kepemimpinannya.

Buku ini sangat cocok dibaca komunitas akademisi, politisi dan rakyat Indonesia. Di tengah bangsa ini menginginkan politisi yang beradab dan berintegritas, kita butuh sosok seperti Abdul Wahab Dalimunthe di Indonesia. Politisi santun, tidak menebar permusuhan. Justru sebaliknya, sosok ini mampu meretas kebekuan dalam konflik politik menjadi cair. Suasana politik yang tegang dapat dicairkan dalam banyak masalah.

Atas nama pribadi dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 1998-2004, saya mengucapkan terimakasih kepada tim penulis yang sudah bersusah payah mengumpulkan dokumentasi dan wawancara kepada banyak pihak, sehingga buku ini terbit sesuai dengan rencana. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi komunitas politik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 18 Juni 2023

dto.

Akbar Tandjung
(Ketua Umum DPP Partai Golkar 1998-2004)



Sambutan

H. Muhammad Jusuf Kalla



Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan taufik hidayah yang dianugerahkan kepada penulis, sehingga buku monumental perjalanan hidup H Abdul Wahab Dalimunthe SH ini dapat diterbitkan sesuai rencana. Penyelesaian buku ini saya apresiasi penuh, terlebih fokus penulisannya mengupas pada persoalan sosok politisi yang sederhana dan penuh integritas.

Bagi saya, sosok Abdul Wahab Dalimunthe merupakan politisi santun, beradab dan tidak ada memiliki banyak musuh dalam berpolitik. Saya mengenal sosok ini sebagai sosok multi-talenta dalam bingkai politik Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Masyarakat Sumatera Utara menyebutnya “Abah Wahab”, dan saya mengetahui itu, karena sosok politisi yang hijrah dari birokrat ini benar-benar orang tua yang mengayomi dan banyak memberikan nasehat kehidupan kepada para politisi muda yang berkiprah di dunia politik.

Yang tidak terlupakan bagi saya, ketika saya menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2004-2009, Abdul Wahab Dalimunthe di era yang sama menjabat sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara. Saat menjabat ketua, sosok ini benar-benar dikagumi banyak lawan dan kawan politik. Mengapa demikian? Abdul Wahab Dalimunthe menjadi sosok yang tidak tergantikan politisi mana pun di Sumatera Utara. Aktivitas politiknya setelah pindah dari birokrat langsung menjadi Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Utara. Bagi saya, ini merupakan prestasi luar biasa dan tidak banyak dimiliki politisi lain di Indonesia.

Sosok Abdul Wahab Dalimunthe tidak dapat kita sangkal, adalah sosok politisi sederhana, tidak sombong dan memiliki modal sosial yang banyak ketika berpolitik. Setelah pensiunan dari birokrat, ia menempuh jalur pengabdian di jalur politik melalui Partai Golkar. Begitu mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Golkar, ia terpilih dan langsung menjadi Ketua DPRD Sumatera Utara 2004-2009. Bagi saya, ini adalah prestasi yang luar biasa dan jarang dimiliki politisi lainnya di Sumatera Utara bahkan Indonesia.

Terbitnya buku perjalanan hidup H Abdul Wahab Dalimunthe ini patut saya apresiasi sedalam-dalamnya. Saya memberikan apresiasi luar biasa atas tim penulis yang bersusah payah merekam, mendokumentasikan dan menuliskan sisi lain kehidupan politik almarhum ketika bertindak sebagai politisi di Partai Golkar. Kebijakan dan pandangan politik Abdul Wahab Dalimunthe banyak termuat dalam buku ini. Bahkan, teladan politik patut dicontoh generasi sekarang dan mendatang, terutama politisi yang fokus berkiprah dalam dunia politik.

Secara pribadi, saya memberikan rekomendasi khusus kepada politisi Partai Golkar mengikuti jejak rekam sosok ini dalam berpolitik. Buku ini enak dibaca dan mudah dicerna oleh semua kalangan, baik akademisi, politisi dan masyarakat umum. Buku ini juga banyak memotret sisi baik dari Abdul Wahab Dalimunthe saat memimpin Partai Golkar maupun saat menjabat Ketua DPRD Sumatera Utara.

Akhirnya, saya mengucapkan terimakasih kepada tim penulis yang sudah menerbitkan buku ini dengan maksimal. Saya berharap buku ini menjadi bahan kajian literatur politik Indonesia. Bagi kalangan birokrasi yang ingin mencurahkan pikiran dan pandangannya terhadap Indonesia, saya menyarankan membaca buku ini dengan baik. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Jakarta, 19 Juni 2023

dto.

H. Muhammad Jusuf Kalla
(Ketua Umum DPP Partai Golkar 2004-2009)



Daftar Isi



Testimoni

Hj. Atikah Rahman Panjaitan

Istri H. Abdul Wahab Dalimunthe, S.H.

v

Pengantar Penulis

ix

Sambutan

Pj. Gubernur Sumatera Utara

Mayjen TNI (Purn) Hassanudin

xiii

Sambutan

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip

Provinsi Sumatera Utara

Dwi Endah Purwanti, S.S., M.Si.

xvii

Sambutan

Presiden RI Ke-6

Jenderal TNI (Purn)

Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

xxi

Sambutan

Dr. Ir. H. Akbar Tandjung

xxv

Sambutan

H. Muhammad Jusuf Kalla

xxix

Daftar Isi

xxxiii

Jejak Langkah di Kampung Halaman

1

A. Jejak Kelahiran dan Keturunan

2

B. Masa Sekolah Rakyat

5

C. Pendidikan Masa Penjajahan

25

D. Jejak Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama

32

Meniti Karir Pendidikan dan Kepribadian

43

A. Menjalani Pendidikan Sekolah Menengah Atas

45

B. Kepribadian Sosial

50

C. Logat yang Tak Pernah Lekang

52

D. Mencurahkan Pikiran, Membangun Persahabatan

53

E. Pemimpin yang Moderat	57
F. Abah yang Tak Pernah Marah	58
G. Bekerja di Londut	61
H. Membangun Kampung Lewat Otonomi Daerah	63
I. Pemimpin Yang Disiplin	65
J. Silaturahmi yang Terawat	69
Jejak Karir di Dunia Politik	73
A. Kiprah Politik di Partai Golkar	74
B. Memimpin DPRD Sumatera Utara	77
C. Kiprah Politik di Partai Demokrat	86
D. Pimpinan Sementara di DPR RI 2019-2024	89
E. Memimpin Dewan Kehormatan DPR RI	93
Pemikiran Politik Kebangsaan	99
A. Pemikiran di Bidang Otonomi Daerah	100
B. Tokoh Pemekaran di Labuhanbatu Raya	105
C. Politik Pemerintahan di Sumatera Utara	107
D. Berkompetisi di Pentas Pilkada	109
Kata Mereka Tentang Abdul Wahab Dalimunthe	115
A. Tidak Dendam Kepada Lawan	116
B. Jadi Tumpuan Keluarga Kami	118
C. Birokrat Bergaya Seloroh	120
D. Tokoh Inspiratif Paripurna	123
E. Birokrat dan Politisi Segudang Pengalamann	125
F. Tokoh Nasionalis, Humoris, dan Religius	129
G. Pemimpin Mendamaikan, Bukan Merusuhi	131
H. Memberi Kesejukan dan Ketenangan	133
I. Sering Bawa Bolu Bika Ambon	136
J. Pernah Nginap Satu Kamar	138
K. Belajar Disiplin yang Sesungguhnya	142
L. Pak Wahab Itu, Suka Menolong Orang	144

M. Peduli Kampung Halaman	146
Daftar Pustaka	179
Biografi Penulis	181

D U M M Y

[halaman ini sengaja dikosongkan]

A decorative mandala pattern in the top-left corner, featuring intricate geometric and floral designs in black and white. The pattern is partially cut off by the right edge of the page.

*Bagian
Satu*

Jejak Langkah di Kampung Halaman



A. Jejak Kelahiran dan Keturunan

Wahab, atau nama lengkapnya Abdul Wahab Dalimunthe SH, lahir pada 10 Januari 1939 di Rantauprapat, sebuah kota kecil kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Ayahnya bernama H. Daud Dalimunthe dan ibunya Dinah Ritonga. Beliau anak ketiga dari tujuh bersaudara. Dua saudara kandungnya, perempuan. Pertama, Hj. Amnah Dalimunthe (6 Desember 1933 hingga 24 Maret 2004). Sedangkan yang kedua, Hj. Salmiah Dalimunthe (31 Desember 1935 hingga 22 Juni 1996). Keempat orang lagi laki-laki. Masing-masing sesuai urutan hingga yang paling bungsu, yaitu: Abdul Aziz Dalimunthe (5 Februari 1940 hingga 28 Februari 1986), H. Abdul Muis Dalimunthe (lahir 1 Maret 1942), Abdul Syaib Dalimunthe (1 September 1943 hingga 8 September 1978), serta Abdul Kahar Dalimunthe (4 Mei 1945 hingga 2 November 2014).

Secara silsilah, beliau sekeluarga masih terbilang dari kalangan terhormat di mata masyarakat. Trah dari sebelah ayahnya merupakan tokoh berdarah biru yang dinasabkan dari garis keturunan Raja Dunia Dalimunthe. Raja Dunia Dalimunthe adalah penguasa di kawasan Tebing Linggahara dan sekitarnya pada zaman dahulu.¹ Namanya termasyhur hingga ke Rantauprapat. Secara administratif, saat ini, Tebing Linggahara tercatat sebagai salah satu desa di Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Namanya dikenal hingga ke Rantauprapat.

Anak keturunan Raja Dunia Dalimunthe bernama Raja Endar Sundin. Sementara, Raja Endar Sundin sendiri diketahui memiliki tiga putra. Putra pertama bernama Raja Ahmad Dalimunthe. Putra kedua, Raja Daud Dalimunthe yang merupakan ayah kandung Wahab. Sedangkan putra yang ketiga, Raja Uyub.

Dalam sejarah kehidupannya, Setelah kelahiran putri kedua, H. Daud Dalimunthe tidak lagi tinggal di Tebing Linggahara. Beliau bersama istri serta anak-anaknya memilih bermukim di jantung kota Labuhanbatu, tepatnya di seberang Taman Makam Pahlawan

¹Wawancara dengan H. Abdul Muis Dalimunthe, adik Kandung H. Abdul Wahab Dalimunthe, pada tanggal 27 April 2023 di Medan.

Rantauprapat. Taman Makam Pahlwan itu, berdekatan dengan kompleks Sekolah Rakyat (SR). Di sanalah Wahab pernah menggali ilmu pengetahuan dasar. Meski tinggal di Rantauprapat, namun tanah leluhur tetap selalu dikunjungi H. Daud. Anak-anaknya juga selalu dibawa serta. Ada kebun karet serta ladang harus selalu dilihat-lihat. Lagi pula, keluarga besar mereka masih berada di kawasan ini.

Setiap kali berpergian ke Tebing Linggahara, mereka menggunakan jalur perjalanan air Sungai Bilah yang ketika itu merupakan sarana transportasi utama. Sungai ini membelah Kota Rantauprapat. Airnya melintasi sejumlah kecamatan di Labuhanbatu, menyatu di titik persimpangan Sungai Barumun, Panai, lalu bermuara di Selat Malaka. Desa Tebing Linggahara termasuk salah satu kawasan pemukiman linear yang berada persis di pinggir sungai ini. Jika hendak pulang pergi ke kampung, Wahab sekeluarga akan naik sampan, boat, atau rakit dari Pekan Lama. Perjalanan via air ini, melewati beberapa kawasan pemukiman penduduk seperti Desa Sibuya, Urung Kompas, Pangkalian, Kampung Salam, lalu sampailah ke Tebing Linggahara.

Berulang-ulang pulang kampung dengan keluarga, merupakan masa-masa indah yang begitu berkesan. Rantauprapat - Tebing Linggahara - Sungai Bilah, menjadi kepingan ingatan yang tetap melekat di hatinya hingga akhir hayat. Kebersamaan dengan sang ayah, harus berakhir di usia Wahab masih dalam masa kanak-kanak. Bahkan, adik bungsunya, Abdul Kahar, baru saja belajar merangkak. Haji Daud menderita sakit hingga menemui ajal. Ketika itu, tahun 1946. Jasadnya kemudian dibawa dengan sampan untuk dimakamkan di perkuburan belakang Masjid Al Munawwarah Desa Tebing Linggahara.

Hari-hari Wahab yatim dilalui dengan penuh kesederhanaan. Meskipun nasab orang tua laki-laki beliau berasal dari keturunan raja dengan harta kekayaan melimpah, namun mereka menjalani kehidupan secara bersahaja, membaur bersama dengan masyarakat lain di lingkungan sekitar. Tak terlihat status bangsawan pada gaya hidupnya dan keluarganya. Bahkan, Wahab kecil yang telah dalam kondisi yatim akibat kepergian Ayahnya di tahun 1946, sudah mulai

belajar berbisnis. Dia turut membantu sang nenek menitipkan kue-kue tradisional di kedai-kedai. Tak jarang, kue-kue itu dibawanya ke sekolah untuk dijual. Pola hidup sederhana ini adalah hasil didikan dan pengajaran yang diterapkan orang tuanya. Hidup sederhana dengan penuh tanggung jawab, tidak berlebihan, tidak berfoya-foya, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan. Anak-anak diajarkan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Anak-anak belajar menghargai dan merawat yang telah dimiliki dengan penuh rasa syukur, juga dengan cara peduli dan berbagi pada sesama.

Kesederhanaan ini pula yang secara langsung dan tidak langsung membentuk karakter serta pendidikan bagi anak cucu keturunan Raja Dunia Dalimunthe di lingkungan keluarga. Khususnya, bagi Wahab sendiri yang senang berbagi hingga akhir hayatnya.

B. Masa Sekolah Rakyat

Wahab di masa kecil, menghabiskan masa kanak-kanak di kota kelahirannya, Rantauprapat. Di kota ini pula ia disekolahkan hingga mulai berstatus remaja. Sebagaimana anak-anak yang berasal dari keluarga yang cukup mapan, Wahab juga menikmati indahnyanya dunia sekolah. Dia mulai mengenyam pendidikan dasar di tahun 1948 di Sekolah Rakyat (SR) Rantauprapat. SR pada masa itu, setara dengan dengan Sekolah Dasar (SD) di masa sekarang. Letak bangunan sekolahnya, di samping Taman Makam Pahlawan Rantauprapat. Sementara, rumah mereka berada di seberangnya.

Meski berasal dari keluarga yang berlimpah harta, Wahab kecil terbilang cukup rajin membantu neneknya berjualan kue. Dialah yang mengantar kue untuk dititipkan di kedai-kedai. Bahkan, tanpa malu-malu ia juga menjual kue-kue tersebut di sekolahnya. Enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1954, Wahab menyelesaikan pendidikan dasarnya dan melanjutkan ke jenjang SMP, masih di kota yang sama. Sekolahnya berada di daerah Sambirejo, Jalan Gajah

Mada Rantauprapat. Di sini dia belajar sejak tahun 1954 hingga tahun 1957.

Selepas dari sekolah menengah, Wahab memutuskan meninggalkan kampung halamannya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi atas biaya penuh dari Uwaknya, Raja Ahmad Dalimunthe. Wahab hijrah ke Medan mengikuti sepupunya yang ketika sudah berprofesi sebagai polisi. Namanya Aladin Dalimunthe.

Karena Aladin berdomisili di kawasan Medan Teladan, maka Wahab mencari sekolah yang letaknya tak begitu jauh dari rumah sepupunya itu. Dia lalu mendaftarkan diri di SMA Negeri 3 Medan. Di rumah ini, Wahab remaja yang semakin menanjak dewasa, tinggal bersama abang sepupunya sekitar delapan tahun.

Tamat dari SMA pada 1960, dia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Negeri di Medan dan mengambil Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum USU. Lima tahun bergelut dengan bidang ilmu hukum, dia berhasil menyandang gelar sarjana hukum persis ketika negeri ini sedang menghadapi gejolak politik dan ekonomi, tepatnya pada tahun 1965.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan merupakan pondasi untuk mempersiapkan masa depan, terutama masa depan anak. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia karena pendidikan dapat mengasah kemampuan dan memaksimalkan potensi seseorang. Pendidikan juga memegang peranan yang menentukan terhadap eksistensi dan perkembangan manusia dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Tak dapat disangkal lagi bahwa pendidikan mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan manusia. Hal ini karena pendidikan merupakan sarana untuk dapat menambah wawasan, mengasah kemampuan, serta memaksimalkan potensi dan bakat yang dimiliki.

Pendidikan dapat membentuk untuk membangun karakter dan kepribadian seseorang menjadi lebih baik. Dalam konteks inilah pendidikan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masa depan. Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan sebenarnya telah berlangsung lama, yaitu sepanjang sejarah manusia itu

sendiri, dan seiring pula dengan perkembangan sosial budayanya. Sejak manusia menghendaki kemajuan dalam kehidupan, maka sejak itu timbul gagasan untuk melakukan pengalihan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan dan segala aspek kepada generasi penerus melalui pendidikan. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidikan harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan sama halnya dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka tentunya peningkatan mutu pendidikan juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena pendidikan merupakan cakupan yang sangat luas, yaitu selain mengasuh, mendidik juga mengembangkan keterampilan, pengetahuan, kepandaian melalui pengajaran, latihan-latihan dan pengalaman. Proses pendidikan harus dimulai sejak dini, yaitu pada usia anak-anak. Pendidikan yang dimulai sejak anak-anak akan dapat mengasah keterampilan, pengetahuan, dan kepandaian seorang anak. Sehingga kepribadian yang positif pada diri anak akan terbentuk dan menjadi bekal untuk masa depannya. Apabila pendidikan kepada anak tidak dimulai sejak ia kecil, maka akan sukar bagi anak untuk menerima batas-batas, hukum, maupun norma kalau si anak kelak dewasa. Jika dalam kepribadian itu tidak ada nilai-nilai dan batas-batas, hukum, maupun norma, kelak saat dewasa akan mudah orang melakukan segala sesuatu menurut dorongan dan keinginan jiwanya tanpa mengindahkan kepentingan dan hak orang lain.

Pendidikan juga dapat mengembangkan intelektual secara akademik dan akhlak anak yang dilakukan secara bertahap. Pertama-tama, pendidikan memberikan dasar bagi anak (peserta didik) dalam upaya mengembangkan kemampuan dan potensi anak. Anak-anak yang mendapat pendidikan yang baik akan memiliki kemampuan untuk memahami berbagai konsep dan ide-ide yang kompleks. Melalui proses pendidikan mereka juga akan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu anak-anak untuk membentuk nilai-nilai positif dan sikap yang baik. Melalui pendidikan, anak-anak dapat belajar

tentang pentingnya menghormati orang lain, bertanggung jawab, disiplin, dan nilai-nilai sosial lainnya. Hal ini dapat membantu anak menjadi individu yang lebih baik dan membantu mereka untuk hidup dalam masyarakat dengan baik pada saat dewasa kelak.

Secara teoretis, ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia tidak mungkin dimilikinya tanpa melalui proses pendidikan, sehingga para ahli pendidikan menempatkan pendidikan sebagai wilayah strategis dan menjadi fokus kajian dalam rangka menciptakan suatu pendidikan yang benar-benar unggul.²

Pada hakikatnya, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui proses pembelajaran di lembaga pendidikan, dari tingkat anak usia dini sampai pada usia pendidikan tinggi. Proses pendidikan berlangsung terus selama hidup seseorang.³ Pendidikan merupakan dasar yang harus diberikan kepada anak sejak dini ketika masih muda. Hal tersebut mengingat bahwa pribadi anak pada usia kanak-kanak masih muda untuk dibentuk. Dengan demikian, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan atau karakter yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Memang secara umum, pendidikan biasanya ditempuh seorang anak pada lembaga pendidikan formal (sekolah). Selain pendidikan formal, terdapat juga pendidikan non-formal yang diselenggarakan di masyarakat. Menurut Noeng Muhadjir masyarakat awam mengenal adanya aktivitas pendidikan di sekolah, pesantren,

²Sam'un Bakry, *Menggagas Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka, 2015), h..iii.

³Lengrand, *Pengantar Pendidikan Sepanjang Hayat*, Terj. Goenawan Muhammad, (Jakarta: Gunung Agung, 1981, 31. Lihat juga Azyumardi Azra, *Pendidikan Akhlaq dan Budi Pekerti: Membangun kembali Anak Bangsa*, Jurnal Mimbar Pendidikan Vol.2 No. 1/XX/2009: 24 29, h.24-29.

⁴H. Moh. Solikodin Djaelani, *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Widya Volume 1 Nomor 2 Juli-Agustus 2013, h. 100-105.

Dan juga di dalam keluarga. Banyak lagi aktivitas interaktif antar manusia yang disebut pendidikan, namun juga sekaligus banyak daerah-daerah batas yang membingungkan untuk dapat disebut aktivitas pendidikan.⁵ Sejalan dengan itu menurut Ahmad Tafsir ahli pendidikan menemui kesulitan dalam merumuskan definisi pendidikan. Kesulitan itu antara lain disebabkan oleh banyaknya jenis kegiatan serta aspek kepribadian yang dibina dalam kegiatan itu, masing-masing kegiatan tersebut dapat disebut pendidikan. Dengan perkataan lain kesulitan itu disebabkan oleh banyaknya jenis kegiatan dan luasnya aspek kepribadian yang harus dibina oleh pendidikan.⁶

Tidak berlebihan bahwa pada hakikatnya pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi anak-anak. Anak-anak yang mendapat pendidikan yang baik akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai masa depan yang berhasil.

Arti penting pendidikan bagi anak-anak juga merupakan perhatian orang tua H. Abdul Wahab Dalimunthe. Pendidikan yang ditempu oleh H. Abdul Wahab Dalimunthe mulai dari sekolah tingkat dasar sampai pada jenjang perguruan tinggi beliau selesaikan. Tak berlebihan apabila beliau berhasil mencapai karir, baik sebagai seorang birokrat maupun politisi, di mana pendidikan yang beliau jalani memberikan kontribusi dalam membentuk dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan memecahkan masalah.

H. Abdul Wahab Dalimunthe menempuh pendidikan dasarnya di SR (Sekolah Rakyat) di daerah Sigambal. Jenjang pendidikan dasar merupakan jenjang terbawah dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah.

⁵Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2015), h. 1.

⁶Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 5.

Sebagai yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, ketika orang tua H. Abdul Wahab Dalimunthe kembali ke Rantau Parapat, H. Abdul Wahab Dalimunthe tidak ikut bersama orang tuanya ke Rantau Parapat. Beliau memilih tinggal bersama kakak beliau di daerah Sigambal untuk melanjutkan pendidikan formal tingkat Dasar, yang pada waktu itu disebut Sekolah Rakyat (SR). Hal ini dituturkan oleh adik kandung H. Abdul Wahab Dalimunthe, yaitu H. Abdul Muiz Dalimunthe:

Aku [H. Abdul Muis Dalimunthe] belajar SD terakhir, di situ SR [Sekolah Rakyat] lah kelas 1. Habis itu pindah ke Rantau Parapat. Kalau almarhum [H. Abdul Wahab Dalimunthe], dia dulu tinggal di Sigambal sama kakaknya. Sekolah SR [Sekolah Rakyat] di situ juga. SR nya itu dekat-dekat masjid, lah. Ku rasa itu sekitas tahun 48 [atau] 49 gitu.”⁷

Dalam catatan sejarah, lembaga pendidikan formal telah dibuka sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, tepatnya pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda membuka pendidikan dasar yang diberi nama *Europese Lagere School* (ELS) atau Sekolah Rendah Eropa. Namun sekolah ELS ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak bangsawan dan orang-orang Eropa, tidak diperuntukkan untuk rakyat pribumi. Namun atas perjuangan dan tekanan dari tokoh-tokoh nasionalis pada tahun 1913 dibukalah sekolah tingkat dasar yang diperuntukkan untuk anak-anak pribumi, yang diberi nama *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS). HIS Pertama kali di buka di Yogyakarta, kemudian diikuti di kota-kota lain di seluruh wilayah jajahan Belanda. Bila sekarang ini kita mengenal pendidikan dasar ditempuh selama enam tahun, maka pada waktu pendudukan Belanda sekolah dasar di HIS murid-murid harus menempuh pendidikan dasar selama tujuh tahun.

⁷Wawancara dengan H. Abdul Muis Dalimunthe, adik Kandung H. Abdul Wahab Dalimunthe, pada tanggal 27 April 2023 di Medan.

D U M M Y Meskipun sudah dibuka sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak pribumi, namun sekolah HIS hanya diperuntukkan untuk kalangan elit pribumi. Sekolah HIS ini dibuka terbatas hanya di perkotaan saja. Sementara di daerah-daerah pedesaan, anak-anak pribumi dari rakyat biasa masih belajar secara tradisional dengan cara mengaji di pesantren atau belajar dari guru ngaji di rumah-rumah. Praktek pendidikan pada masa kolonial Belanda menunjukkan deskriminasi antara anak kelas atas (pejabat) dengan anak rakyat biasa. Praktek pendidikan yang diselenggarakan oleh kolonial Belanda memang memberikan kesempatan pada anak-anak pribumi. Namun sesungguhnya pendidikan yang diselenggarakan oleh kolonial Belanda untuk anak-anak pribumi sesungguhnya bertujuan demi kepentingan penjajahan Belanda di Indonesia untuk dapat melanggengkan penjajahannya, seperti menciptakan tenaga kerja yang bisa menjalankan tugas-tugas penjajah dalam mengeksploitasi sumber dan kekayaan alam Indonesia.

Pendidikan masa kolonial Belanda yang diselenggarakan pada saat itu bertujuan mencetak tenaga-tenaga pegawai rendah yang harus setia mengabdikan kepada kepentingan Belanda. Pendidikan yang diselenggarakan tidak ditujukan untuk meningkatkan taraf atau tingkat kebudayaan rakyat Indonesia. Isi pendidikan yang diberikan berupa pengetahuan dan kecakapan bersifat teknis yang dapat digunakan untuk mengurus dan melancarkan kepentingan Belanda, khususnya dalam mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Kesempatan yang diberikan kepada anak didik, terutama dari kalangan pribumi, dibatasi. Sekolah yang disediakan tidak memadai dan sangat sedikit untuk menampung jumlah anak-anak rakyat Indonesia yang membutuhkan pendidikan. Hanya sebagian kecil anak-anak Indonesia yang dapat masuk ke sekolah dan itu pun diutamakan untuk anak-anak Indonesia dari kalangan lapisan tengah dan atas. Kurikulum yang diberikan terutama berkaitan dengan Belanda dan kebudayaannya serta sangat kurang diberikan pelajaran mengenai Indonesia dan kebudayaannya.

Pada masa kependudukan Belanda hanya mereka-mereka kaum elite yang memiliki kedudukan dan berada di pusat kota yang dapat mengenyam bangku sekolah, hal ini berbeda dengan yang

dialami oleh mereka yang tinggal di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat kota administrasi provinsi yang terbilang cukup sulit sekali mendapatkan akses pendidikan secara baik yang merupakan sarana tempat mendapatkan pengetahuan dan pembelajaran yang baik.⁸

Meskipun demikian, selain sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah, berkembang pula sekolah-sekolah yang didirikan oleh kaum pribumi. Sekolah-sekolah tersebut bertujuan untuk mengisi kelemahan-kelemahan pendidikan bagi kaum pribumi. Bagi mereka pendidikan bukan menjadikan pemuda Indonesia menadi orang Belanda berkulit coklat, tetapi pendidikan harus dimaknai sebagai upaya agar anak-anak pribumi menjadi anak-anak Indonesia yang berbudaya Indonesia, beraga, dan terampil. Terdapat sekolah-sekolah yang dimaksud tersebut, di antaranya Sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh Seowardi Soeryaningrat (Ki Hajar Dewantara), Sekolah Kayutanam (INS) yang didirikan oleh Moh. Syafei, Sekolah Muhamadiyah yang didirikan oleh Kyai H. Achmad Dahlan. Dalam perjalannya sekolah-sekolah tersebut semakin berkembang. Ketika sekolah-sekolah yang didirikan kaum pribumi tersebut semakin berkembang, maka pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Undang-undang Sekolah Liar, yang menyebutkan sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh kaum pribumi ini digolongkan sebagai sekolah liar. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh kaum pribuni semakin di awasi dengan ketat, karena ditakutkan akan menjadi suatu kelompok yang anti terhadap pemerintah Belanda dan dianggap membahayakan posisi kolonial Belanda. Akibatnya banyak sekolah-sekolah yang didirikan kaum pribumi menjadi korban akibat pengawasan ketat, khususnya dari aspek administrasi.⁹

Pada tahun 1942, Jepang berhasil menguasai Indonesia dan tampil sebagai salah satu kekuatan baru di Asia Pasifik. Pada awalnya, pendudukan Jepang di Indonesia mendapatkan simpati

⁸Andi Suherman dan Weny Widyawati Bastaman, *Perkembangan Sekolah Rakyat...*, h. 12.

⁹Erlina Wiyannarti, Wawan Darmawan, *Sejarah Pendidikan*, Handbook. h. 14.

yang cukup baik dari masyarakat. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai macam propaganda yang digaungkan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia. Setelah berhasil menguasai Indonesia sepenuhnya, Jepang mulai untuk merubah berbagai sistem dan kebijakan yang telah berlangsung di Indonesia. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Jepang adalah dalam bidang pendidikan.

Setelah tiga bulan menguasai pemerintahan, penguasa militer mulai membuka sekolah hampir semua desa. Tingkatan pendidikan dasar *Volkschool* diubah namanya menjadi Sekolah Rakyat (SR) atau disebut juga dengan *Kekumin Gakko*. Di Jawa pada masa pendudukan Jepang, pendidikan di sekolah dilaksanakan dengan sistem pendidikan tunggal dan kurikulum baru yang dibuat oleh pemerintah militer Jepang.¹⁰

Ketika pemerintah militer Jepang berkuasa di Indonesia tahun 1942-1945, tujuan pendidikan yang pada saat itu dijalankan adalah menjadikan pemuda-pemuda Indonesia untuk dapat mengabdikan kepada militerisme Jepang dan dapat membantu Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya.¹¹ Sesuai dengan tujuan tersebut, pelajaran yang diberikan sebagian besar meliputi doktrin militer, keharusan setiap pagi melakukan upacara dan olah raga pagi, pelajaran mengenai bahasa dan kebudayaan Jepang dimasukkan dalam kurikulum. Dengan demikian maka taraf pengetahuan umum dan ilmu yang diterima oleh pemuda-pemuda di sekolah sangat rendah. Dalam sistem pendidikan yang dijalankan, pemerintah Jepang mementingkan pendidikan dan pengajaran rakyat dengan dasar kebudayaan dan kemasyarakatan Indonesia yaitu dengan diperbolehkannya bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran diawasi secara ketat, semangat militer Jepang digiatkan. Pada masa tersebut sekolah swasta dilarang.¹²

¹⁰Chiyo Kawamura, "Pendidikan Sekolah Rakyat di Jawa Pada Masa Pendudukan Jepang dari Perspektif Buku Pelajaran", *Lembaran Sejarah*, Vol. 7, No. 1, 2004, hlm. 156.

¹¹Makmur, Djohan, Pius Suryo Haryono, et al., 1993. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, h. 101.

¹²Penerbitan Sejarah Lisan No.4. 1988. *Di bawah Pendudukan Jepang*:

Pada dasarnya, terdapat perbedaan sistem pendidikan yang diterapkan oleh Jepang. Beberapa hal yang dilakukan oleh Jepang dalam bidang pendidikan adalah dihapuskannya sistem pendidikan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Belanda. Penyederhanaan dalam sistem pendidikan dilakukan oleh Jepang dengan tujuan untuk memudahkan pengawasan terhadap sekolah-sekolah tersebut. Sekolah umum terdiri dari atas Sekolah Rakyat 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Tinggi masing-masing 3 tahun.¹³

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia pada masa itu memiliki kedaulatan untuk menyelenggarakan pendidikan. Namun di masa awal kemerdekaan Indonesia, sistem pendidikan ala Jepang kemudian diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan alasan bahwa sistem pendidikan Jepang sangat cocok diterapkan bagi sebuah negara yang baru saja diproklamasikan dan untuk membangun mental dan karakter bangsa dari ancaman Belanda dalam usahanya untuk menguasai kembali daerah jajahannya. Sistem pendidikan tersebut kemudian diterapkan di semua wilayah kedaulatan RI.

Pada tahun 1945 ini juga, tepatnya pada tanggal 25 November 1945, berdiri Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang memiliki asas-asas perjuangan, di antaranya sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.
2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan.
3. Membela hak dan nasib buruh pada umumnya dan guru pada khususnya.

Dengan dicantumkan asas pertama, yaitu “Mempertahankan serta menyempurnakan Republik Indonesia, PGRI memiliki tujuan pertama-tama untuk lebih memprioritaskan perjuangan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dibanding kepentingan

Kenangan Empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya. Jakarta: Arsip Nasional RI, h. 87.

¹³Amrin Imran, dkk., *Indonesia dalam Arus Sejarah: Perang dan Revolusi*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, T. T.), hlm. 75

kepentingan lain sehingga dengan demikian partisipasi guru dalam melaksanakan pengabdian dan perjuangan kemerdekaan tidak sedikit". Bisa disimpulkan bahwa usaha-usaha yang pernah dilakukan pemerintah berkaitan dengan pendidikan pada tahun 1945-1950 adalah seputar bangunan sekolah, guru, kurikulum, sistem kerja, serta biaya. Berkaitan dengan keperluan bangunan sekolah, tindakan utama adalah merenovasi bangunan rusak atau hancur lebur akibat revolusi fisik atau bangunan tersebut dipakai oleh pemerintah. Langkah yang dibuat oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Mendirikan gedung-gedung untuk sekolah baru tetapi hal itu tidak mencukupi kebutuhan.
2. Menggunakan perumahan-perumahan rakyat/swasta yang memadai untuk dijadikan bangunan sekolah,
3. Menyelenggarakan proses mengajar sebanyak dua kali sehari yang berarti bahwa dalam satu bangunan sekolah dipergunakan oleh dua sekolah.

Selain usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi usaha kekurangan bangunan sekolah tersebut, juga tidak kekurangan partisipasi masyarakat yang bergotong royong membangun bangunan sekolah dengan peralatannya dan yang kemudian disumbangkan kepada pemerintah. Hal ini juga merupakan suatu cara yang bertujuan hendak membentuk kelas masyarakat dan dengan harapan pelajaran di sekolah akan disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada waktu itu.¹⁴

Kemudian, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, dibentuklah Badan Pembantu Presiden, yaitu KNIP yang ditugaskan untuk menggodok bentuk dan pelaksanaan pendidikan nasional. Pada akhir desember, tepatnya 29 Desember 1945, KNIP menyerahkan hasil kerja kepada kementerian pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Pokok-pokok pendidikan dan pengajaran di Indonesia sebagai realisasi pengajaran baru hasil kerja KNIP meliputi: tujuan pendidikan dan pengajaran untuk

¹⁴Salsabiil Rihhadatul Aisy & Hudaidah, *Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama*, dalam Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021, h. 571.

menyusun masyarakat baru, untuk memperkuat persatuan, sistem dan metode pendidikan dan pengajaran.¹⁵

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia memiliki landasan falsafat Pancasila dan landasan konstitusi berupa UUD 1945. Pada pasal 31 UUD 1945 menyebutkan: (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; (2) pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang di atur dengan undang-undang. Landasan dasar negara ini yang digunakan oleh Pemerintah Orde Lama untuk menyusun dan melaksanakan sistem pendidikan nasional. Hal ini karena Pancasila sebagai dasar dan falsafat negara Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam pembukaan UUD 1945, yang dijadikan landasan utama pendidikan di Indonesia.¹⁶

Adapun perubahan yang mendasar pada bidang pendidikan di masa awal kemerdekaan Indonesia yaitu perubahan menyangkut penyesuaian kebijakan-kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita suatu bangsa yang merdeka dan negara yang ingin berdiri sendiri. Sehingga untuk penyesuaian itu, dengan melihat cita-cita bangsa Indonesia maka tujuan pendidikan di Indonesia di ubah, terutama dari segi landasan filosofis pendidikan, tujuan pendidikan, sistem pendidikan, dan kesempatan yang diberikan kepada rakyat Indonesia agar semua elemen masyarakat Indonesia dapat merasakan pendidikan, dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi.¹⁷

Landasan dasar negara yaitu Pancasila yang digunakan oleh Pemerintah Orde Lama untuk menyusun dan melaksanakan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan di Indonesia dengan penjenjangan: (1) Pendidikan Rendah (sekolah Rakyat); (2) Pendidikan Menengah (Umum, Kejuruan, dan Keguruan); (3) Pendidikan Tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, dan Akademik).

¹⁵M. R. Fadli & D. Kumalasari, *Sistem Pendidikan Indonesia pada Masa Orde Lama: Priode 1945-1966*, dalam Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran, Vol. 9, No. 2, Tahun 2019, h. 157-171.

¹⁶Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1995), h. 31-32.

¹⁷Ardiana Sari Dangu I Ketut Laba Sumarjiana, & Rudi Anto, *Sejarah Pendidikan Indonesia Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1950*, dalam Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 3, No. 2, Tahun 2022, h. 4720.

Pendidikan rendah adalah sekolah dasar yang sejak awal kemerdekaan di sebut Sekolah Rakyat (SR). Lama pendidikan yang semula tiga tahun menjadi enam tahun. Maksud dari tujuan didirikannya SR ini adalah meningkatkan taraf pendidikan pada zaman sebelum kemerdekaan, dan juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah.

Pada Tanggal 1 Januari 1946, dibentuklah Bagian Pendidikan Masyarakat di Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Tujuan dibentuknya Bagian Pendidikan Masyarakat tersebut ialah untuk membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang dapat dicapai dengan dua cara, yaitu metode belajar serta metode bekerja yang dilaksanakan secara masal dan integral di suatu desa. Metode bekerja yang digunakan adalah metode Panca Marga, yaitu lima jalan untuk mencapai tujuan, sebagai berikut: (1) Melestarikan dasar-dasar pengertian untuk membangun masyarakat dengan melaksanakan pendidikan dasar untuk masyarakat, (2) Membentuk kader-kader pendidikan untuk membangun masyarakat dengan melaksanakan pendidikan kader masyarakat, (3) Menyediakan dan menyebarkan bacaan dengan mengadakan perpustakaan atau taman pustaka masyarakat, (4) Memfungsionalkan golongan wanita dengan melaksanakan pendidikan kewanitaan, dan (5) Memfungsionalkan golongan pemuda dengan melaksanakan pendidikan taruna karya.

Pendidikan masyarakat mempunyai tugas memberantas buta huruf, menyelenggarakan kursus pengetahuan umum dan mengembangkan perpustakaan rakyat Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan *leer plan* (rencana pelajaran) ketimbang istilah *curriculum* dalam bahasa Inggris. Susunan Rencana Pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Rencana Pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat, dari pada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap

kesenian, dan pendidikan jasmani.¹⁸

D U M M Y

Pada tanggal 1 Maret 1946 SK Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan no.104/Bhg.0, merumuskan tujuan pendidikan berorientasi untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, bertanggung jawab, dan bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Rumusan tujuan pendidikan yang demikian itu tentunya tidak terlepas dari faktor lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan lainnya.¹⁹ Rumusan tujuan pendidikan ini memang sangat penting mengingat pada masa itu Indonesia baru saja memproklamkan kemerdekaan. Sehingga membutuhkan semangat sosial, demokratis, bertanggung jawab dan bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk membangun sebuah negara yang berdaulat.

Kemudian selanjutnya kurikulum SD diatur sesuai dengan putusan Menteri PK tanggal 19 November 1946 No. 1153/Bhg.A., yang menetapkan daftar pelajaran SR dimana lebih menekankan pelajaran bahasa dan berhitung. Hal ini dapat dilihat bahwa dari 38 jam pelajaran dalam seminggu, delapan jam adalah untuk bahasa Indonesia, empat jam untuk bahasa Daerah dan tujuh jam berhitung (kelas IV,V dan VI).²⁰ Sebutan sekolah dasar (SD) diresmikan pada 13 Maret 1946.

Pada tahun 1949, pendidikan dan pengajaran belum dapat dilaksanakam secara teratur. Pengajaran dilaksanakan secara berkelompok di serambi-serambi, di garasi dan di tempat-tempat lain yang aman kondisi pengajaran seperti itu terjadi karena banyak sekolah ditutup disebabkan banyak guru-guru ikut bergerilya melawan Belanda. Begitu juga rakyat bersama tentara, bahu-membahu memusatkan perhatian berjuang melawan Belanda yang menduduki wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan kondisi ini pula, sehingga penekanan tujuan pendidikan lalu difokuskan pada penanaman semangat nasionalisme dan patriotisme (cinta

¹⁸Ardiana Sari Dangu I Ketut Laba Sumarjiana, & Rudi Anto, *Sejarah Pendidikan Indonesia...*, h. 4721.

¹⁹A. Saputra, *Menuju Sistem Pendidikan Global*, dalam Unisia, Vol. 31, No. 67, Tahun 2008, h. 3.

²⁰Puspita Sari, *Sejarah Pendidikan di Majene*, h. 55-56.

tanah air).²¹ Tujuan pendidikan dalam rangka membangkitkan nasionalisme dan patriotisme telah banyak menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Terlebih lagi pada masa itu banyak sekolah-sekolah yang tutup karena banyak para guru ikut bergerilya melawan Belanda yang mencoba kembali untuk melakukan penjajahan di Indonesia.

Pendidikan pada masa orde lama banyak dipengaruhi oleh kondisi politik Indonesia pada masa itu. Indonesia baru saja lepas dari belenggu penjajah. Sehingga saat itu adalah masa-masa mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya ancaman dari dalam dan luar negeri tentunya menjadi bahaya bagi Indonesia yang belum lama memproklamasikan kemerdekaannya. Pendidikan hadir sebagai jembatan bagi rakyat Indonesia untuk berkembang. Pendidikan yang diberikan pada masa itu tidak jauh dari bidang bahasa, berhitung, administrasi, dan juga mengenai nasionalisme dan demokrasi. Pancasila merupakan landasan falsafah pelaksanaan pendidikan. Pada masa ini sudah tercipta kebijakan bahwa semua kalangan masyarakat berhak mendapatkan pendidikan.

Praktek pendidikan pada masa awal kemerdekaan Indonesia masih dalam keadaan sulit. Meskipun kondisi pendidikan yang demikian sulit, tetapi tetap mampu menghasilkan produk hukum tentang pendidikan, yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1950. Di tahun 1950, tepatnya pada tanggal 5 April 1950, pemerintah menertibkan Undang-undang No. 4 Tahun 1950. Undang-undang tersebut menjelaskan tujuan pendidikan dan pengajaran ialah untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dan wajib belajar 6 tahun yang diberlakukan oleh pemerintah. Undang-undang ialah produk hukum pendidikan nasional pertama di Indonesia, suatu produk hukum dan sistem pendidikan nasional.²² Selain itu, kurikulum pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan baru mulai muncul pada tahun 1947 yang disebut *leer plan*.²³ Pada tahun 1950, kurikulum pendidikan Indonesia mengalami perubahan dengan

²¹Puspita Sari, *Sejarah Pendidikan di Majene 1942-1960*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), hlm. 6.

²²M. R. Fadli & D. Kumalasari, *Sistem Pendidikan Indonesia ...*, h. 157-171.

²³Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Indonesia...*, h. 36.

dikeluarkannya UU No.4 tahun 1950.

D U M M Y

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia 1945-1950, pemerintah belum dapat menjalankan roda pemerintahan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan kondisi dan situasi negara yang belum stabil. Hal tersebut juga ikut mempengaruhi Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan atau biasa disingkat dengan Kementerian PP dan K. Kementerian Pendidikan dinilai belum mampu membuat pendidikan di Indonesia berjalan efektif, walaupun pendiriannya sudah dibentuk pada awal kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 tetapi pembangunan pendidikan belumlah optimal yang salah satu faktornya adalah seringnya berganti menteri seiring dengan bergantinya kabinet.²⁴

Pendidikan di Indonesia antara tahun 1945-1950 merupakan pendidikan masa perjuangan. Ciri-ciri utama pada masa periode ini ialah terdapat semacam dualisme dalam pendidikan. Ketika salah satu pihak pendidikan dan pengajaran berlangsung di beberapa daerah negara federal yang dikuasai atau dalam pengaruh Belanda, sedangkan yang dipihak lain langsung dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia.²⁵

Meskipun demikian, beberapa kebijakan-kebijakan telah dirumuskan. Kebijakan-kebijakan yang diambil Sarmidi Mangunsarkoro, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri PP dan K (1949-1950) didasarkan atas realitas yang ada di masyarakat. Berikut ini adalah beberapa kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pada tahun 1949-1950, yaitu:

1. Pemberantasan Buta Huruf (PBH) dan Kursus Lanjutan PBH.
2. Penetapan Kalender Akademik.
3. Pendirian Akademi Semi Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta.
4. Penghargaan Terhadap Para Pelajar Pejuang Revolusi.
5. Undang-undang No. 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan Nasional.
6. Sistem Universitas Gajah Mada.

²⁴Helius Sjamsuddin, dkk, *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), h. 8.

²⁵Salsabil Rihhadatul Aisy & Hudaidah, *Pendidikan Indonesia...*, h. 572.

7. Dan kebijakan lain-lain.²⁶

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada saat Sarmidi menjabat dapat dikatakan sebagai kebijakan yang bersifat mendasar bagi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Namun hal tersebut justru sangat penting. Dengan memberikan dasar yang kuat maka pembangunan pendidikan di Indonesia dapat sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Sehingga pendidikan di Indonesia nantinya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada masa itu memberikan dampak langsung dalam bidang pendidikan. Dalam bidang sosial dapat kita lihat pada Tujuan pendidikan dan pengajaran negara Indonesia dalam UU No. 4 tahun 1950 pada Bab II pasal 3 berbunyi: “Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. Kalau kita melihat bahwa cita-cita bangsa Indonesia sudah terkandung lengkap dalam Pancasila, maka dapat kita katakan susila adalah sesuai dengan pancasila. Walaupun pada dasarnya sikap atau perilaku seseorang tidak hanya ditentukan oleh lingkungan pendidikannya tetapi dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk menciptakan manusia Indonesia yang berjiwa pancasila.

Meskipun pada masa tahun 1945-1950, begitu juga di tahun-tahun selanjutnya, negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan Undang-undang Dasar terutama tentang pendidikan, namun untuk dasar falsafah negara tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan utama pendidikan di Indonesia, yang memberikan kepada rakyat Indonesia agar semua elemen masyarakat Indonesia dapat merasakan pendidikan, dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, sejak-sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

²⁶Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Indonesia...*, h. 37.

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Uraian singkat pendidikan pada masa awal kemerdekaan yang di atas merupakan gambaran pendidikan tingkat dasar yang ditempuh oleh H. Abdul Wahab Dalimunthe. Hal ini mengingat bahwa beliau menempuh pendidikan dasarnya pada masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. H. Abdul Wahab Dalimunthe menempuh pendidikan dasarnya di SR (Sekolah Rakyat) di daerah Sigambal. Sekarang ini, daerah Sigambal merupakan salah satu kelurahan di bawah naungan administratif kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Kelurahan Sigambal sendiri berjarak sekitar 9 km dari Kota Rantau Parapat.

C. Pendidikan Masa Penjajahan

Jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) memiliki peranan penting dalam sistem penjejangan pendidikan sekolah formal, terlebih lagi masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Tujuan pendidikan sekolah dasar itu sendiri adalah meletakkan kecerdasan dasar, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup secara mandiri dan mengikuti pendidikan secara lanjut. Selain itu, dengan adanya pendidikan dasar ini dapat menjadikan seorang anak membentuk individu yang mampu hidup secara berkelompok.

Ada beberapa fungsi dari pendidikan dasar sebagai acuan sebelum melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya, karena jika pada tingkat pendidikan dasarnya saja kurang diperhatikan, maka tentu untuk ke tingkat selanjutnya juga akan sulit dan menjadi kurang baik. Adapun fungsi dari pendidikan dasar menurut

Muhammad Ali dalam bukunya (2009:33) adalah sebagai berikut:

1. Dengan melalui pendidikan dasar maka peserta didik akan dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir secara kritis, membaca, menulis, berhitung, dan penguasaan-penguasaan dasar untuk mempelajari sains serta kemampuan dalam berkomunikasi yang merupakan suatu tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Dengan pendidikan dasar dapat memberikan dasar-dasar untuk dapat mengikuti pendidikan pada tingkat selanjutnya. Karena pada hakikatnya keberhasilan mengikuti pendidikan di sekolah menengah serta perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengikuti pendidikan dasar.

Pendidikan dasar sangatlah penting bagi anak dan sangat berpengaruh bagi perkembangan bangsa dan negara ke depan. Karena pendidikan sekolah dasar merupakan pondasi awal bagi anak untuk dapat mengembangkan potensi dan pengetahuan akademik di sekolah formal. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pendidikan sekolah dasar merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan dan mencentak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti, dan santun serta mampu menyelesaikan permasalahan dilingkungannya. Di sekolah dasar inilah siswa dituntut untuk menguasai kesemua bidang studi, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Akan tetapi, pembelajaran tidak hanya dilakukan di sekolah saja, diluar sekolahpun sama saja itu merupakan suatu pembelajaran.

H. Abdul Wahab Dalimunthe mulai menjalani pendidikan tingkat dasar selama 6 tahun, dimulai pada tahun 1948 sampai pada tahun 1954. Pada tahun pertama beliau menjalani pendidikan dasar, beliau masih tinggal bersama orang tuanya. Kemudian di tahun-tahun berikutnya orang tua beliau berpindah mukim kembali ke Rantau Parapat. Namun H. Abdul Wahab Dalimunthe tidak ikut bersama orang tuanya yang pindah ke Rantau Parapat. Beliau tetap melanjutkan pendidikan sekolah dasarnya di Sigambal sampai

beliau lulus pendidikan sekolah dasar pada tahun 1954.

Selama menempuh masa pendidikan sekolah dasar di Sigambal, H. Abdul Wahab Dalimunthe tinggal bersama kakak beliau. Meskipun jauh dari orang tua tak menyurutkan tekad beliau untuk menyelesaikan pendidikan formal sekolah dasar. Begitu juga orang tua beliau yang sangat mendukung H. Abdul Wahab Dalimunthe untuk tetap melanjutkan pendidikan sekolah dasar di Sigambal meskipun mereka berpisah tempat tinggal untuk sementara waktu.

Selama menjalani masa pendidikan sekolah dasar H. Abdul Wahab Dalimunthe belajar seperti anak-anak pada umumnya di masa itu. Tidak ada kemewahan fasilitas sekolah yang diterima beliau. Namun beliau tetap semangat menjalani proses pendidikan dasar. Mungkin beberapa anak jaman sekarang ini dalam menjalani proses pendidikan meminta kepada orang tuanya sarana dan prasarana fasilitas tertentu. Apabila kemauan anak tidak dituruti oleh orang tua, misalnya anak meminta uang jajan sekolah dalam jumlah tertentu dan orang tua tidak mengabulkannya, maka si anak akan bermalas-malasan untuk bersekolah, dan bahkan tidak mau bersekolah. Kondisi demikian itu tidak ada pada diri H. Abdul Wahab Dalimunthe. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh adik kandung H. Abdul Wahab Dalimunthe, yaitu H. Abdul Muiz Dalimunthe:

“Waktu itu SD atau SMP kami di belanjain [diberi uang jajan] dari uwak, lah [abang ayah]. Dari uang belanja yang dikasih abang ayah itu uang belanja buat jajan. Karena dulu mana [tidak] ada uang sekolah dulu. Uang jajan aja, lah. Dikasih uang jajan sama abangnya seperak. Waktu itu sudah lumayan lah itu seperak buat beli air tebu.”²⁷

Berdasarkan potongan wawancara di atas, kita dapat melihat semangat H. Abdul Wahab Dalimunthe untuk bersekolah. Meskipun

²⁷Wawancara dengan H. Abdul Muis Dalimunthe, adik Kandung H. Abdul Wahab Dalimunthe, pada tanggal 27 April 2023 di Medan.

tidak ada fasilitas mewah yang diberikan oleh orang tua beliau, tetapi beliau tetap menjalani proses pendidikan formal sekolah dasar hingga tamat. Berdasarkan wawancara di atas juga kita bisa melihat bahwa sekolah, terutama sekolah dasar pada masa itu tidak dikenakan biaya pendidikan. Karena terdapat sekolah-sekolah yang disediakan pemerintah pada saat itu secara bebas biaya. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan bagi para siswa dalam menjalani proses pendidikan ialah semangat dan ketekunan untuk terus bersekolah dalam rangka menuntut ilmu pada pendidikan formal. Dalam konteks inilah H. Abdul Wahab Dalimunthe menjalani pendidikan formal tingkas sekolah dasar dengan semangat dan ketekunan, hingga beliau menamatkan pendidikan sekolah dasar dan kemudian melanjutkan pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi.

Pada masa itu, memang terdapat beberapa model sekolah. Hal ini terjadi setelah RIS kembali menjadi kesatuan RI, pada tanggal 25 Agustus 1950 tepatnya di Yogyakarta kementerian PP dan K mengeluarkan keputusan tentang perubahan sekolah yang dilakukan di daerah-daerah RI. Sekolah dibagi menjadi enam kelompok, model-model sekolah yang berasal pada era sebelum kembali kenegara kesatuan di bekas daerah-daerah kependudukan Belanda diubah dan disesuaikan dengan model pendidikan dan pengajaran nasional. Beberapa ketentuannya adalah sebagai berikut: *Pertama*, semua Sekolah Rakyat Negeri harus jadi sekolah yang luar biasa dengan bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. *Kedua*, kelas pemulihan dibuka untuk murid-murid Sekolah Rakyat yang awalnya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. *Ketiga*, kelas pemulihan boleh menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dengan syarat bahwa secepat mungkin harus diperbaiki ke bahasa Indonesia lagi. Dan *keempat*, pada kota-kota besar kelas-kelas pemulihan menjadi sekolah yang berdiri sendiri.

Pada masa itu juga terdapat Sekolah rakyat Partikelir yang bersubsidi dan yang tidak bersubsidi. Sistem pembelajaran pada Sekolah Rakyat bersubsidi didasarkan pada: *pertama*, bahasa pengantar bahasa Indonesia. *Kedua*, harus menggunakan model pelajaran Sekolah Rakyat Negeri dan diperbolehkan menambah pelajaran lain asalkan mendapat persetujuan kemeterian PP

dan K. Sedangkan Sekolah Rakyat yang tidak bersubsidi sistem pembelaaran didasarkan pada: *pertama*, bebas ingin menggunakan bahasa pengantar apa saja. *Kedua* bahasa Indonesia tetap mata pelajaran wajib. Ketiga, pemerintah memiliki hak pengawas. Pada sekolah rakyat yang bersubsidi ini juga memiliki keistimewaan, diantaranya: *pertama*, bahasa pengantar yang digunakan yaitu bahasa Belanda. *Kedua*, diperuntukkan anak-anak warga negara Belanda yang bekerja di pemerintah Indonesia. Ketiga, dari jumlah murid pemerintah dapat menentukan tunjangan murid. *Keempat*, diperbolehkan menerima anak-anak dari warga negara asing.²⁸

Semangat H. Abdul Wahab Dalimunthe dalam menjalani proses pendidikan ini dapat menjadi teladan bagi kita, baik orang tua maupun anak, agar tetap bersemangat dalam menjalani proses pendidikan. Karena memang pada dasarnya suatu proses, apapun itu, pasti memiliki tantangannya sendiri. Apakah tantangan itu bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Dengan fasilitas yang seadanya, beliau tetap bersemangat untuk menjalani proses pendidikan. Terlebih lagi pada masa-masa beliau menempuh pendidikan, yang pada zaman itu terbilang sulit karena Indonesia baru saja merdeka.

Pada masa H. Abdul Wahab Dalimunthe menjalani pendidikan sekolah dasar, pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan menetapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kebijakan mengenai demokratisasi pendidikan dan wajib belajar 6 tahun bagi seluruh warganya yang sudah berumur 8 tahun, status pendidikan agama yang bersifat tidak wajib, dan penggunaan bahasa daerah bagi pembelajaran kelas 1, 2, dan 3 Sekolah Rakyat. Konsekuensinya dari kebijakan mengenai demokratisasi pendidikan dan wajib belajar 6 tahun, tentu saja pemerintah harus menyediakan sekolah, guru, perlengkapan belajar, dan biaya operasional pendidikan bagi Sekolah Rakyat (nama yang digunakan sebelum diganti menjadi Sekolah Dasar).

²⁸Salsabil Rihhadatul Aisy & Hudaidah, *Pendidikan Indonesia*, h. 576.

D U M M Y
Sayangnya, kesulitan kehidupan perekonomian negara tidak memberikan kesempatan yang baik bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan wajib belajar tersebut. Sementara itu jumlah penduduk usia sekolah SR dan berminat masuk sekolah setiap tahun semakin besar. Penghapusan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan digantikan dengan bahasa Indonesia, pandangan masyarakat yang melihat pendidikan sebagai wahana untuk memperbaiki kehidupan mencontoh para pemimpin bangsa yang terdidik bahkan banyak yang menyandang gelar kesarjanaaan, merupakan faktor-faktor yang juga berpengaruh terhadap pendidikan.

Selain pemerintah yang tidak memiliki kemampuan melaksanakan wajib belajar 6 tahun, banyak pula orang tua yang tidak mampu mengirimkan putra-putrinya ke sekolah. Banyak keluarga yang tidak dapat menyekolahkan putra-putri mereka karena keterbatasan bangku di sekolah dan keterbatasan ekonomi keluarga. Bagi mereka yang sudah berusia 8 tahun atau lebih pun banyak yang tidak mampu bersekolah. Pendidikan tetap membutuhkan biaya baik yang harus disediakan pemerintah mau pun yang harus disediakan oleh orang tua. Peraturan sekolah yang longgar mengenai pakaian, tidak ada pakaian seragam, tidak pula perlu memakai sepatu sehingga banyak peserta didik Sekolah Rakyat yang tidak bersepatu, penggunaan batu tulis yang dibagikan sekolah tetap menuntut adanya biaya tambahan dari orang tua. Orang tua harus menyediakan uang jajan dan transportasi. Ini merupakan biaya ekstra dari biaya dasar kehidupan sebagian besar keluarga tersebut. Bagi keluarga yang mampu membiayai sekolah anaknya, maka anak-anak dapat mengeyam pendidikan di sekolah formal. Sementara sebagian keluarga lainnya yang tidak memenuhi biaya sekolah, maka mereka tidak mengirimkan anak-anak mereka bersekolah. Namun pada masa itu ada pula anak yang tetap bertekad keras sekolah tanpa uang jajan dan transportasi melainkan jalan kaki, dan biaya lainnya.²⁹

²⁹S. Hamid Hasan, *Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah*, Naskah dalam buku Indonesia Dalam Arus Sejarah. h. 9.

Pada masa awal kemerdekaan pendidikan sangat penting bagi masa depan, khususnya masa depan anak dan juga untuk membangun bangsa Indonesia yang baru merdeka. Namun nyatanya pada masa itu masih banyak anak yang tidak menempuh pendidikan, khususnya pendidikan formal. Hal ini dapat dimungkinkan karena faktor ekonomi, kemalasan dari anak itu sendiri, atau karena faktor alasan lainnya yang memang pada masa itu Indonesia baru merdeka. Pada masa itu para orang tua banyak menginginkan anaknya untuk bersekolah demi memperbaiki drajat orang tua tapi kendala yang harus mereka hadapi adalah mempersiapkan bekal untuk setiap hari dan setiap kali anaknya berangkat sekolah dan hal ini menjadi beban tersendiri yang harus mempersiapkan biaya sehari-hari yang mana pada masa tersebut membuat para orang tua semakin sulit mencari biaya tambahan.³⁰ Dalam konteks ini, peran orang tua dalam proses pendidikan anak sangat penting. Dengan perhatian dan dukungan dari orang tua, maka hal tersebut akan menjadi semangat bagi anak dalam menjalani proses pendidikan formal.

Meskipun H. Abdul Wahab Dalimunthe dalam menjalani proses pendidikan tingkat dasar jauh dari orang tua, beliau tetap bersemangat dalam menjalani proses pendidikan. Semangat menempuh proses pendidikan ini terus berlanjut sampai beliau menapaki jenjang pendidikan SMA dan perguruan tinggi di Kota Medan.

D. Jejak Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan jenjang pendidikan pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD atau Sederajat). Sekolah menengah pertama

³⁰Andi Suherman dan Weny Widyawati Bastaman, *Perkembangan Sekolah Rakyat (Volkschool) Di Gunung Kencana Kabupaten Lebak Banten Tahun 1940 – 1964*, dalam *Bihari: Jurnal Pendidikan sejarah dan Ilmu Sejarah*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2019, h. 11.

DUMNY
ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun. Pendidikan menengah adalah pendidikan yang dilakukan bagi lulusan pendidikan dasar dan mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang mampu menjaga hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam dan dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut di bidang pekerjaan atau pendidikan tinggi. Pada masa penjajahan Belanda, sekolah menengah tingkat atas disebut sebagai *meer uitgebreid lager onderwijs* (MULO). Setelah Indonesia merdeka, MULO berubah menjadi sekolah menengah pertama (SMP) pada tanggal 13 Maret 1946.

Sekolah formal adalah lingkungan pendidikan yang mengembangkan dan meneruskan pendidikan anak menjadi warga negara yang cerdas, terampil & bertingkah laku baik. Selain sebagai tempat proses belajar-mengajar, sekolah juga bertujuan untuk mengelola sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Fungsi sekolah tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya sebagai lembaga pendidikan formal. Menurut Suwarno fungsi sekolah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan;
2. Spesialisasi, sekolah mempunyai fungsi sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
3. Efisiensi, terdapatnya sekolah sebagai lembaga sosial yang berspesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran, maka pelaksanaan pendidikan menjadi lebih efisien;
4. Sosialisasi, sekolah mempunyai peranan penting dalam proses sosialisasi, yaitu proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial; dan
5. Konservasi dan transmisi kultural, transisi dari rumah ke masyarakat.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah memiliki tujuan-tujuan yang harus dicapai. Tujuan sekolah antara

lain yaitu menyediakan program pendidikan yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan atas hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, pribadi dan kebutuhan kemasyarakatan serta kepentingan individu para siswa. Oleh sebab itu para siswa harus dilibatkan secara aktif baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam kegiatan sekolah.

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal tempat proses belajar mengajar berlangsung. Pendidikan formal adalah lembaga yang merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan multi level dan terstruktur yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. **Jenjang pendidikan di Indonesia** adalah proses pengajaran tentang ilmu pengetahuan, keterampilan serta kemampuan yang terlihat dari kebiasaan setiap orang yang diwarisi dari orang-orang sebelumnya, dan ini menjelaskan bahwa konsep pendidikan diperlukan guna untuk mendukung suatu ilmu pengetahuan, serta perkembangan atau pelatihan.

Sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini, pendidikan di Indonesia dilaksanakan dan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat pendidikan dibagi berdasarkan usia dan kemampuan siswa, setiap tingkat pendidikan memiliki usia dan durasi studi yang berbeda. Tingkat pendidikan ini memudahkan pengelompokan siswa dan tujuan, serta kebijakan dan masalah lain yang terkait dengan pendidikan. Secara umum tingkat pendidikan di Indonesia di mulai SD, SMP, SLTA, dan perguruan tinggi.

SMP merupakan jenjang pendidikan pertama yang mengutamakan penyiapan peserta didik (siswa) untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan pengkhususan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Guna menunjang tujuan sekolah, khususnya SMA yang membutuhkan persiapan khusus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sekolah dapat melakukannya dalam bentuk kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, H. Abdul Wahab Dalimunthe melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah

Menengah Pertama (SMP). Beliau menjalani pendidikan SMP mulai pada tahun 1954 sampai dengan lulus pada tahun 1957 di Rantau Parapat, tepat sekolahnya di daerah Sambirejo. Jika semasa pendidikan sekolah tingkat dasar H. Abdul Wahab Dalimunthe tinggal bersama kakak beliau, maka semasa menempuh pendidikan SMP beliau kembali ke Rantau Parapat tinggal bersama orang tua beliau yang sudah lebih dulu kembali ke Rantau Parapat sebagai kampung halaman. Hal ini dituturkan oleh adik kandung H. Abdul Wahab Dalimunthe, yaitu H. Abdul Muiz Dalimunthe:

“Kemudian tamatlah Pak Wahab di sana [Sigambal] SR nya itu, Smp-nya lanjut ke Ranto, Sambirejo sanalah. Saya waktu itu masih SD lagi di muka [di depan sekolah SMP H. Abdul Wahab Dalimunthe], tuh. [karena] Duluan dia [H. Abdul Wahab Dalimunthe] pulaknya SMP. Saya [H. Abdul Muiz Dalimunthe] SD-nya dekat Makam Pahlawan, SD 1 lah sekitar tahun 40-an.”³¹

Pada masa 1950-1966, negara Indonesia beberapa kali melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Meskipun begitu dasar falsafah negara tidak terjadi perubahan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan memiliki falsafah Pancasila dan landasan Konstitusi berupa UUD 1945. Pada pasal 31 UUD 1945, yang berbunyi 1) Tiap warga berhak mendapat pengajaran, 2) Pemerintah mengusahakan sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UU. Landasan dasar negara ini digunakan untuk menyusun dan melaksanakan sistem pendidikan nasional.

Penting untuk diketahui bahwa pada masa itu terdapat dua jenis pendidikan Umum yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah Menengah Tinggi (SMT). Sekolah Menengah Pertama (SMP), sama seperti di zaman Jepang, juga SMP menggunakan sistem pelajaran yang sama, tapi setelah dikeluarnya surat keputusan oleh menteri PPK, maka dibuatlah pembagian A dan B dimulai dari

³¹Wawancara dengan H. Abdul Muis Dalimunthe, adik kandung H. Abdul Wahab Dalimunthe, pada tanggal 27 April 2023 di Medan.

kelas II sehingga didapat kelas IIA, IIB, IIIA dan IIIB. Pada bagian A diberikan setidaknya sedikit ilmu alam dan ilmu pasti. Tetapi lebih banyak diberikan pelajaran bahasa dan praktek administrasi dan B sebaliknya. Sekolah Menengah Tinggi (SMT), SMT merupakan pendidikan dengan masa tiga tahun setelah SMP dan sesudah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Berikut merupakan rencana pembelajaran yang berlaku yaitu: (1) isinya memenuhi kebutuhan nasional, (2) bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar, (3) mutu yang tingkatannya sama dengan SMT menjelang kemerdekaan.³²

Pada kurikulum ini merangkum setiap mata pelajaran yang dijuluki “Rencana Pelajaran Terurai 1952”. Pada kurikulum ini siswa berperan sebagai objek karena guru menjadi subjek utama dalam memberikan ilmu pengetahuan. Serta guru yang mengatur apa saja yang akan didapat siswa di kelas. Dan guru juga yang keberhasilan siswa pada sistem pendidikan.

Gambaran pendidikan formal di Indonesia di atas menunjukkan gambaran pendidikan tingkat SMP yang dijalani oleh H. Abdul Wahab Dalimunthe. Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada masa beliau bersekolah didasarkan pada surat keputusan oleh menteri PPK, yang membagi A dan B dimulai dari kelas II sehingga didapat kelas IIA, IIB, IIIA dan IIIB. Pada bagian A diberikan setidaknya sedikit ilmu alam dan ilmu pasti. Tetapi lebih banyak diberikan pelajaran bahasa dan praktek administrasi dan B sebaliknya. Dalam hal ini tentunya sistem kurikulum setiap mata pelajaran didasarkan pula pada sistem kurikulum “Rencana Pelajaran Terurai 1952”.

Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, H. Abdul Wahab Dalimunthe melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 1954. Pada masa H. Abdul Wahab Dalimunthe menjalani pendidikan SMP, pemerintah Indonesia masih menggunakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950. Pada masa itu, berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah hanya mewajibkan wajib belajar 6 tahun, yaitu pada tingkatan sekolah dasar saja. Untuk tingkatan SMP pada masa itu belum menjadi kewajiban. Meskipun demikian H. Abdul Wahab Dalimunthe tetap

³²Salsabiil Rihhadatul Aisy & Hudaidah, *Pendidikan Indonesia...*, h. 572.

Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan*

melanjutkan pendidikan beliau setamatnya dari sekolah dasar ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Pada masa tahun 1950-an, ada pemikiran disebagian kalangan masyarakat bahwa modal kerja keluarga maka bersekolah berarti keluarga kehilangan penghasilan (*income forgone*). Banyak keluarga yang memandang anak sebagai tenaga kerja di rumah tangga, anak tertua harus menjaga adiknya ketika orangtuanya bekerja. Jika anaknya harus bersekolah maka di rumah tidak ada yang menjaga adik-adiknya dan ini bukan situasi keluarga yang baik. Kalau ibu harus menjaga anak-anaknya maka banyak pekerjaan yang menjadi kewajiban ibu menjadi terbengkalai atau yang lebih buruk lagi ibu tersebut tidak mungkin mencari penghasilan tambahan. Oleh karena itu anak yang mereka miliki, terlebih-lebih anak perempuan, diharuskan membantu di rumah dan dibiarkan tidak bersekolah.

Fenomena pemikiran sebagian masyarakat yang memandang anak sebagai modal kerja tentunya tidak ada dalam pemikiran keluarga H. Abdul Wahab Dalimunthe. Hal ini dapat dilihat, khususnya pada H. Abdul Wahab Dalimunthe, yang tetap melanjutkan pendidikan formal setamatnya dari sekolah dasar ke jenjang SMP, bahkan beliau melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA/SLTA dan juga perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua H. Abdul Wahab Dalimuthe sangat mendukung anak-anaknya, terkhusus dukunga kepada H. Abdul Wahab Dalimunthe, untuk terus bersekolah tinggi hingga sampai perguruan tinggi.

Dalam konteks ini, peran orang tua dalam proses pendidikan anak sangat penting. Dengan perhatian dan dukungan dari orang tua, maka hal tersebut akan menjadi semangat bagi anak dalam menjalani proses pendidikan formal. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam proses pendewasaan, proses pembentukan karakter, kepribadian dan wawasan anak.

Orang tua (ayah dan ibu) dalam kehidupan sehari-hari memiliki peranan yang sangat penting terhadap pendidikan anak di dalam keluarga terutama terhadap pendidikan formal anak. Menurut Umar Tirtahardja menyatakan pendidikan formal adalah

“pendidikan yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku”. Mulai dari sekolah dasar (SD, SMP), menengah (SMA/SMK/MA) sampai perguruan tinggi (PT). Pada umumnya keluarga (disamping sekolah dan masyarakat) memegang peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan anak, karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama, dimana anak mendapatkan pengaruh yang besar di dalam keluarga terutama dalam proses pendidikannya.³³ Orang tua dalam menjalankan perannya dalam pendidikan, perlu dengan terus menerus untuk mendorong, membimbing, memotivasi, dan memfasilitasi demi tercapainya pendidikan anak yang baik.

Keterlibatan orang tua sangat penting dalam meningkatkan dan memajukan pendidikan formal anak. Orang tua juga harus mampu memperhatikan dan memberi contoh yang baik bagi anak dirumah. Menurut Stainback dan Susan peran orang tua dalam pendidikan anak yaitu sebagai fasilitator, motivator dan pembimbing. Peran sebagai fasilitator dimana orang tua menyediakan pendidikan dan pembelajaran bagi kegiatan anak. sedangkan peran sebagai motivator yaitu dimana orang tua mendorong anak semakin aktif dan kreatif dalam belajar, memberikan penghargaan serta kata-kata pujian untuk anak. peran orang tua sebagai pembimbing yaitu dengan siap membantu belajar anak dirumah dan membantu mengatur waktu belajar anak di rumah.³⁴

Dukungan dan perhatian orang tua juga sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan formal anaknya. Menurut Santrock, orang tua berperan penting terhadap keberhasilan pendidikan anak disekolah”. Ini membuktikan bahwa peran orang tua sangat dibutuhkan dalam meningkatkan keberhasilan pendidikan formal (sekolah) anak.³⁵

³³Umar Tirtahardja. *Pengantar Pendidikan*, Edisi Revisi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 76.

³⁴Stainback dan Susan. (1999). *Peran Orang Tua Dan Motivasi Belajar*. (online). (<http://dheeazz.blogspot.co.id/2009/12/peran-orang-tua-dan-motivasi-belajar.tml>). diakses 17 Oktober 2017).

³⁵Santrock, W, John. *Remaja* (Edisi Kesebelas Jilid 2). (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 117.

D U M M Y

Dalam konteks pendidikan, orang tua H. Abdul Wahab Dalimunthe memberikan dukungan dan perhatian kepada anak-anaknya, khususnya kepada H. Abdul Wahab Dalimunthe, untuk terus melanjutkan pendidikannya pada jenjang SMP, bahkan sampai beliau beliau menamatkan pendidikan formalnya di perguruan tinggi. Hal ini patut kita jadikan teladan bahwa orang tua memiliki Orang tua memiliki peranan yang sangat penting terhadap pendidikan anak di dalam keluarga terutama terhadap pendidikan formal anak. Orang tua dalam menjalankan perannya dalam pendidikan, perlu dengan terus menurus untuk mendorong, membimbing, memotivasi, dan memfasilitasi demi tercapainya pendidikan anak yang baik.

Dalam kenyataan, terutama era sekarang ini, banyak orang tua tidak menjalankan peran atau tanggung jawab mereka dengan baik terhadap pendidikan formal yang dijalani anak. Masih ada orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas mereka sehingga orang tua kurang punya waktu untuk memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih terhadap pendidikan yang dijalani anak. kurangnya waktu yang dimiliki orang tua terhadap anak bisa mengabaikan peran mereka terhadap pendidikan anak, seperti kurangnya perhatian, pengawasan, bimbingan dan motivasi orang tua terhadap anak. terkadang orang tua juga cenderung cuek atau acuh tak acuh terhadap pendidikan yang dijalani anak.

Mereka beranggapan bahwa dengan menyekolahkan anaknya saja itu sudah cukup. Padahal untuk meningkatkan dan memajukan pendidikan anak bukan hanya saja disekolahkan, tetapi orang tua pun harus ikut terlibat dengan pendidikan yang dijalani anak seperti memberikan perhatian, memotivasi anak, membimbing anak, mem-fasilitasi dan mengawasi anak.

Kurang berperannya orang tua dalam pendidikan formal anak tidak saja terjadi di kota-kota yang para orang tua sibuk bekerja seharian. Kurang berperannya orang tua dalam pendidikan formal juga bisa terjadi pada keluarga yang berada di desa, yang pada umumnya para orang tua bekerja sebagai petani. Orang tua yang bekerja sebagai petani padi tentu saja tidak sepenuhnya berada di rumah, terkadang orang tua harus turun dari pagi atau subuh

hingga sore atau petang untuk mengurus sawah/ladang demi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini tentu mengurangi waktu kebersamaan di dalam keluarga sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian dan pengawasan yang lebih dari orang tua kepada anak mereka terutama anak yang masih berada pada usia sekolah.

Terkait hal ini, meskipun orang tua H. Abdul Wahab Dalimunthe berkebudaya karet dan menanam padi untuk memenuhi nafkah keluarga, namaun orang tua beliau tetap memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya, termasuk dukungan pendidikan kepada H. Abdul Wahab Dalimunthe. Orang tua beliau semaksimal mungkin memberikan perhatian, dukungan, dan fasilitas untuk pendidikan anak-anaknya. Terlebih lagi pada tahun 1950-an, bahkan juga sampai saat ini, ada pemikiran di sebagian kalangan masyarakat bahwa modal kerja keluarga maka bersekolah berarti keluarga kehilangan penghasilan. Oleh karena itu, banyak para orang tua yang tidak memperhatikan pentingnya pendidikan anak. Para orang tua lebih memilih anaknya untuk membantu pekerjaan orang tua, apakah itu membantu pekerjaan mengurus rumah atau bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Misalnya bagi keluarga yang tinggal di desa, anak membantu orang tua di ladang atau di sawah untuk membantu perekonomian keluarga. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat sekolah merupakan jalan untuk masa depan anak di kemudian hari.

Meskipun orang tua H. Abdul Wahab Dalimunthe tinggal jauh dari kota (desa), dan bekerja dengan berkebudaya karet dan menanam padi untuk memenuhi nafkah keluarga, namaun orang tua beliau tetap memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Dalam konteks ini, peran orang tua dalam proses pendidikan anak sangat penting. Dengan perhatian dan dukungan dari orang tua, maka hal tersebut akan menjadi semangat bagi anak dalam menjalani proses pendidikan formal.

Orang tua memiliki peran atau tanggung jawab untuk bisa memberikan perhatian dan dukungan pendidikan kepada proses pendidikan anak, baik itu di rumah maupun pendidikan yang bersifat formal seperti di sekolah. Pendidikan formal seperti di

sekolah yang dijalani anak tidak semata-mata menjadi tanggung jawab guru, melainkan orang tua juga harus berperan aktif dalam mengawasi pendidikan anak mereka sehingga pendidikan yang dijalani anak akan mengalami kemajuan atau peningkatan ke jenjang-jenjang berikutnya.

Pentingnya pendidikan bagi anak sangat dirasakan oleh orang tua H. Abdul Wahab Dalimunthe. Sehingga orang tua beliau tetap memberikan perhatian dan dukungan kepada anak-anaknya untuk tetap terus menempuh jenjang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari bukti bahwa H. Abdul Wahab Dalimunthe dapat menjalani proses pendidikan formalnya sampai pada perguruan tinggi di Medan meskipun harus jauh dengan orang tua beliau.

D U M M Y

[halaman ini sengaja dikosongkan]



Daftar Pustaka



- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2003. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, Ismail. 2009. *Pemilu dan Partai Politik di Sumatera Utara*. Medan: Fisipol UMA.
- Fahmi, Ismail. 2009. *Gambaran Pelaksanaan Pilkada di Sumatera Utara*. Medan: Fisipol UMA.
- Muhammad, Husaini Hasan. 2015. *Dari Rimba Aceh ke Stockholm*. Banda Aceh: Batavia Publishing.
- Hamzah, Murizal. 2014. *Hasan Tiro: Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Pelly, Usman. 2016. *Etnisitas dalam Politik Multikultural (buku III)*. Medan: Casa Mesra.
- Pelly, Usman. 2021. *Etnisitas dalam Politik Multikultural (buku IV)*. Medan: Casa Mesra.
- Pelly, Usman. 2016. *Etnisitas dalam Politik Multikultural (buku IV)*. Medan: Casa Mesra.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D U M M Y

[halaman ini sengaja dikosongkan]



Biografi Penulis





Dr. Anang Anas Azhar, M.A.

Lahir di Desa Tebing Linggahara, Kabupaten Labuhanbatu, 04 Oktober 1974. Ia manamatkan pendidikan dasarnya di SD Inpres 116241 Rantau Prapat. Setelah tamat ia belajar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Rantau Prapat hingga menamatkan studinya tahun 1993. Anak pertama dari pasangan Saibon AS (*alm*) dan Jamilah SM (*almh*) ini, termasuk anak rajin dan gigih

menuntut ilmu. Tahun 1993, ia kuliah di Program Studi Penyiaran dan Penerangan Agama Islam (PPAI) Fakultas Dakwah IAIN – sekarang UIN Sumatera Utara Medan. Tahun 2009, ia menyelesaikan S2 di UIN Sumatera Utara, hingga menamatkan program doktor (S3) tahun 2016 konsentrasi disertasi Komunikasi Politik Islam.

Sejak menjalani studi UIN Sumatera Utara, bakat penulis sudah terlihat dalam dunia jurnalistik. Ia *full time* menekuni dunia wartawan dan bekerja di sejumlah media cetak dan media online bahkan mengaktifkan diri sebagai politisi. Meski pada akhirnya, ia mengabdikan hidupnya sebagai pengajar status PNS di UIN Sumatera Utara dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), mengampu mata kuliah komunikasi politik, jurnalistik dan media digital. Penulis juga aktif sebagai aktivis di DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara 1998-2000, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2006-2010 dan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2010-2014. Wakil Direktur Bidang SDM dan Binroh Rumah Sakit Muhammadiyah Sumut 2014-2016. Saat ini, ia diamanahkan menjabat Ketua Lembaga Pengembangan Cabang Ranting Dan Pembinaan Masjid (LPCRPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2023-2028.

Prestasi akademik yang pernah ditorehkan penulis adalah publis jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terindeks Sinta dan mengoleksi 742 tulisan artikel/opini yang dimuat dan

tersebar di media cetak/media online di Sumatera Utara. Beliau juga pernah dipercaya sebagai tenaga ahli pimpinan DPRD Sumut periode 2009-2014. Sejak di UIN Sumatera Utara, ia juga dipercaya sebagai Staf Ahli Rektor UINSU periode 2016-2020, Sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) S2 FDK UINSU tahun 2020, Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara 2022-2023, dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (FDK) UIN Sumatera Utara periode 2023-2027.

Tidak sampai di situ, penulis juga menghasilkan karya dalam bentuk buku. Tercatat, ia pernah menulis buku berjudul “Pencitraan Politik Elektoral” penerbit Atap Buku, Yogyakarta, 2017. Komunikasi politik untuk pencitraan, penerbit Perdana Publishing, 2017, *The Black Magic of National Mandate Party/Partai Amanat Nasional Gaining The Real Vote*, Lambert Academic Publishing, Germany, 2018. Kontributor menulis buku *Politik Ala Islam Indonesia Kumpulan Essay Politik*, penerbit Perdana Publishing, 2016. Karya-karya lain dari penulis dapat dilihat di [digoogole scholar/cendekia](https://scholar.google.com/cendekia) atas nama anang anas azhar.

Prestasi akademik lain yang diperoleh, ia sangat aktif memberikan pencerahan akademik di luar kampus, seperti nara sumber kepemiluan, nara sumber tetap FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, dan nara sumber, instruktur di beberapa organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa di Propinsi Sumatera Utara.

Dr. Iwan, M.H.I.

Merupakan putra ketiga dari pasangan ayahanda Al-M Nasir Nasution dan Fatimah. Ia dilahirkan di Desa Tanjung Medan tanggal 09 September 1988. Pada tahun 2001 penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tanjung Medan. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) tamat tahun 2004 dan Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren Irsyadul Islamiyah Tanjung Medan tamat tahun 2007. Dengan kecintaan kepada ilmu pendidikan penulis melanjutkan pendidikan S1 di IAINSU sekarang UINSU Medan tepatnya di Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal al-Syakhsyah dan selesai pada tahun 2011.



Atas keinginan penulis serta dorongan dan motivasi kedua orangtua, penulis melanjutkan pendidikan S2 di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara tepatnya pada Prodi Hukum Islam pada tahun 2011 dan tamat tahun 2013. Berbekal keyakinan terhadap pertolongan Allah serta support yang tinggi dari kedua orangtua, penulis melanjutkan studi S3 (doctoral) Bidang Hukum Islam di UIN Sumatera Utara tahun 2014 dan selesai tahun 2017. Sejalan dengan itu, penulis menikah di tahun 2015 dengan Azizah Aftariy Ritonga, SE dan dikaruniai seorang putra bernama Said Ramadhan Al-Faqih Nasution dan Shafa Azkia An-Nashirah Nasution.

Selain beraktifitas sebagai dosen di UINSU, penulis juga aktif sebagai pengurus di berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti PB Al-Wasliyah, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sumatera Utara, MUI Kota Medan, Badan Hisab dan Rukyah MUI Deli Serdang, Ikatan Keluarga Nasution (IKANAS-SU), Ikatan Keluarga Labuhanbatu Raya (IKLAB Raya Medan dan sekitarnya), Ikatan Keluarga Labuhanbatu Selatan (IKLAS), Forum Komunikasi Da'i Muda Indonesia Sumatera Utara (FKDMI-SU), DPP IMPAKAR SU, BAPOR UIN SU, Pusat Pengembangan dan Pelayanan Disabilitas (PPPD UIN SU), dan Meja Inspirasi. Penulis juga aktif melaksanakan pengabdian kepada

masyarakat seperti mengisi ceramah di berbagai majlis ta'lim, khutbah jum'at, imam Ramadhan, dan lain sebagainya.

Di sela-sela kesibukannya penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah: (Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Prenada 2015), Kumpulan Do'a Sehari-hari, Medan: Manhaji, 2015), (Handbook Metodologi Studi Islam, Jakarta: Prenada, 2018). sebagai penulis buku (Sudirman, Dirasah Al-Islamiah, Bandung: Cita Pustaka, 2012), (Saidurrahman, Tafsir Ayat Politik, Bandung: Cita Pustaka, 2013), (Saidurrahman, Politik Islam Ala Indonesia, Bandung: Cita Pustaka, 2016), (Armia, Fikih Munakahat: Medan, Manhaji, 2015), (Nurul Huda Prasetya, Negara Islam Kajian Ushul Fiqh Terhadap Pemikiran Abu Al-A'la Al-Maududi, Medan: Manhaji, 2016), (Ahmat Faury, Ahmat Anak Simpai Keramat, Medan: Manhaji, 2016), menghasilkan penelitian (Pandangan Ulama Terhadap Perkembangan Kontemporer Aliran Keagamaan Di Kota Medan, LP2M IAIN SU, 2014).

Selain penulis buku, Iwan juga aktif sebagai editor beberapa buku dan melakukan perjalanan muhibah ke banyak Negara seperti Arab Saudi, Thailand, Malaysia dan Singapura.



Drs. Rivai Nasution, M.M.

Merupakan tokoh berpengalaman asal Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Tokoh energik yang aktif di organisasi kedaerahan Ikatan Keluarga Labuhanbatu (Iklab) Raya dan Pengurus Besar Ikatan Keluarga Labuhanbatu Selatan (PB Iklas) ini, lahir di Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, tanggal 31 Desember 1961.

Rivai termasuk salah seorang tokoh paguyuban pergerakan Iklab Raya sejak tahun 1991 dan selama 33 tahun telah mengabdikan dirinya untuk membesarkan Iklab Raya. Terlebih lagi ia mewakafkan waktunya untuk mendirikan Masjid Iklab di Jalan Letjen Jamin Ginting (Medan-Berastagi) tepatnya di Simpang RSUP H Adam Malik. Ia juga aktif berjuang mewujudkan pemekaran Kabupaten Labuhanbatu menjadi 3 (tiga) kabupaten, yakni Kabupaten Labuhanbatu (induk), Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bahkan saat itu, Rivai dipercaya sebagai Sekretaris Panitia Pendukung Proses Percepatan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu (P5KLB).

Rivai juga dikenal sebagai pencetus ide pembuatan buku biografi tokoh Sumatera Utara Alm H Abdul Wahab Dalimunthe. Di samping berjiwa seni dan sosial, sosok Rivai berpenampilan sederhana, supel bergaul, dan mendalami hobi *entertain* serta travelling.

Tokoh ini merupakan purna atau mantan birokrat murni. Ia pernah bertugas di Dinas Pendidikan Kota Medan, kemudian menjabat di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, serta terakhir diberi amanah sebagai Kepala Bagian Hubungan Kerjasama Pemko Medan. Selama aktif bertugas, Rivai telah mengunjungi dan menjalin kerja sama dengan beberapa kota di sejumlah negara, antara lain Chicago, Milwaukee (Amerika Serikat), Kremlin, Moskow (Rusia), Hongkong, Beijing, Shanghai, Chengdu ,

Senzen, Macau, dan Xiamen (RRT), Sofia, Plovdiv, Burgas dan Nassebar (Bulgaria), Seoul, Gwangju (Korea Selatan), Tokyo, Ichikawa dan Hitachinaka (Jepang), Frankfurt (Jerman), Dubai (Arab Saudi), Bangkok (Thailand), Singapura, dan Malaysia.

Beliau pernah mengikuti sejumlah pendidikan dan pelatihan selama bertugas ini, juga menerima berbagai penghargaan dari pemerintah dan organisasi. Ia juga pernah meluncurkan buku “Bersama Iklab Membangun Labuhanbatu yang Lebih Maju” pada tahun 2007, serta buku “Menuju Labuhanbatu Selatan yang Gemilang” pada tahun 2009, sebagai penulis Rivai Nasution bersama Saidurrahman.

Anak dari pasangan Alm H Maksun Nasution dan Almh Hj Siti Rahmah Dasopang ini, hingga kini masih dipercaya sebagai Sekjend Iklab Raya dan Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Quatul Musllimin Jalan HM Joni Medan. Suami dari Hj Rosmini Fithri SPd MSi dan ayah dari Dr Bachtiar Rivai Nasution SSTP MAP dan Rifdah Saidah Nasution ini juga aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan pelajar. Dia diamanahkan sebagai Pembina Himpunan Mahasiswa (HM) Iklab Raya, Pembina Himlab, pendiri PP Ipma Labusel, pendiri GP Iklab, Pembina Gepmalabusel, Bendahara MOI Sumut, Penasehat DPD Ikanas Sumut, Penasehat PWRI Sumut, Penasehat JBMI Sumut dan Wakil Ketua DPD AMPI Sumut periode 2016-2018.